

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PEMUSNAHAN BARANG
BUKTI HARIMAU SUMATERA DALAM TINDAK PIDANA PASAL 21 UU NO.5
TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN
EKOSISTEMNYA**

**(Studi putusan pengadilan negeri No. 44/Pid.B/2016/PN.Agm dan putusan No.
702/Pid.sus/2015/PN.Jmb)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**



Oleh:

GALANG RIZKI WANDIRO

NIM. 115010100111109

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PEMUSNAHAN BARANG BUKTI HARIMAU SUMATERA DALAM TINDAK PIDANA PASAL 21 UU NO.5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA (Studi putusan pengadilan negeri No. 44/Pid.B/2016/PN.Agm dan putusan No. 702/Pid.sus/2015/PN.Jmb)**

Identitas Penulis :

a. Nama : Galang Rizki Wandiro

b. NIM : 115010100111109

c. Konsentrasi : Hukum Pidana

Jangka Waktu Penelitian : Tiga Bulan

Disetujui pada tanggal : 26 Juli 2018

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Eny Harjati, SH., M.Hum.
NIP. 19590406 198601 2 001

Ardi Ferdian, SH., M.Kn.
NIP. 19830930 200912 1 003

Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Pidana,

Dr. Yuliati, S.H, LLM
NIP. 19660710 199203 2 003

HALAMAN PENGESAHAN

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PEMUSNAHAN
BARANG BUKTI HARIMAU SUMATERA DALAM TINDAK PIDANA
PASAL 21 UU NO.5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER
DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA (Studi putusan pengadilan
negeri No.44/Pid.B/2016/PN.Agm dan putusan No. 702/Pid.sus/2015/PN.Jmb)**

Oleh:

GALANG RIZKI WANDIRO

NIM. 115010100111109

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Eny Harjati, SH., M.Hum.
NIP. 19590406 198601 2 001

Ardi Ferdian, SH., M.Kn.
NIP. 19830930 200912 1 003

Ketua Bagian
Hukum Pidana

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr.Yuliati,S.H, LLM
NIP. 19660710 199203 2 003

Dr. Rachmad Safa'at, SH.,M.Si.
NIP. 19620805 198802 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Galang Rizki Wandiro

Nim : 115010100111109

Mengapa bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum berupa skripsi ini adalah karya asli penulis, tidak ada karya atau data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang berada di kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, 25 Juli 2018

Galang Rizki Wandiro

115010100111109

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, atas segala kenikmantan dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Segala kemudahan yang telah diberikan atas ketidak-tahuan manusi menjadi gerbang pencerahan atas kehendak ALLAH SWT, yang lagi MAHA MENGETAHUI. Tiada pengingkaran diri dari penulis atas kemudahan selama penulisan skripsi dengan judul:

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PEMUSNAHAN BARANG BUKTI HARIMAU SUMATERA DALAM TINDAK PIDANA PASAL 21 UU NO.5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA (Studi putusan pengadilan negeri No.44/Pid.B/2016/PN.Agm dan putusan No. 702/Pid.sus/2015/PN.Jmb)

Shalawat tak terlupa terucap dan selalu tercurah kepada Rasulullah SAW, sang pencerah dan suri tauladan kepada seluruh umat di dunia. Berkat perantara beliau kita berada di dunia yang terang benderang dari jaman kegelapan kebodohan.

Tidak ada yang mampu penulis berikan selain ucapan terima kasih dan rangkaian do'a agar Allah SWT. memberi kelapangan dan kelanggengan ilmu yang bermanfaat, keberkahan rezeki, serta ampunan yang melimpah kepada seluruh pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih atas kesedian untuk membaca dan mengkaji hasil penelitian ini. Penulis juga menyadari akan kekurangan yang tidak terlepas dari penulisan skripsi ini, selain itu, penulis juga membuka diri dan hati untuk kesediaannya menyampaikan masukan dan kritik yang membangun demi meningkatkan kualitas pengembangan keilmuan.

Akhir kata, penulis mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini, baik kesengajaan atas kekhilafan semata. Semoga Allah SWT. memberi petunjuk dan kemudihan kepada kita untuk mengikutinya. Aamiin.

Malang, Juli 2018

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
RINGKASAN	viii
SUMMARY	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	24
C. Tujuan Penelitian	24
D. Manfaat Penelitian	24
E. Sistematika Penelitian	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	28
A. Hukum dan Peradilan: Ciri Negara Hukum	28
B. Sistem Peradilan Pidana.....	34
C. Pertimbangan Hukum.....	39
D. Potret Hukum terhadap Satwa yang Dilindungi.....	45
E. Penanganan Barang Bukti	49
BAB III METODE PENELITIAN.....	54
A. Jenis Penelitian.....	54
B. Pendekatan Penelitian	55
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	55
D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum.....	57
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	57
F. Definisi Konseptual.....	59
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	61
A. Pertimbangan hukum terhadap pemusnahan barang bukti Harimau Sumatera dalam putusan Pengadilan Negeri no. 44/Pid.B/2016/PN.Agm dan putusan no. 702/PID.Sus/2015/PN.Jmb.....	61
1. Gambaran Umum Pemusnahan terhadap Barang Bukti Harimau Sumatera dalam Putusan Pengadilan.....	64
2. Dasar Hukum Pemusnahan Barang Bukti Harimau Sumatera.....	70
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana atas barang bukti satwa yang dilindungi di Indonesia.....	81

B. Analisa Pemusnahan Barang Bukti Harimau Sumatera terhadap prinsip kemanfaatan hukum.....	93
BAB V PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	100



RINGKASAN

Galang Rizki Wandiro, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2018, PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PEMUSNAHAN BARANG BUKTI HARIMAU SUMATERA DALAM TINDAK PIDANA PASAL 21 UU NO.5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA (Studi putusan pengadilan negeri No. 44/Pid.B/2016/PN.Agm dan putusan No. 702/Pid.sus/2015/PN.Jmb), Eny Harjati, SH., M.Hum. dan Ardi Ferdian, SH., M.Kn.

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Pertimbangan Hukum Pemusnahan Terhadap Hasil Tindak Pidana Dengan Barang Bukti Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), pilihan tema ini dilatarbelakangi oleh adanya penanganan terhadap barang bukti berupa bagian-bagian dari satwa yang dilindungi, yang memiliki kekuatan hukum tetap dengan adanya putusan pengadilan dan didasarkan atas pertimbangan hukum hakim sebagai perwujudan atas asas legalitas, didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Akan tetapi penanganan barang bukti tersebut mengabaikan unsur kemanfaatan atas barang bukti satwa yang dilindungi berikut dengan bagian-bagiannya. Ketentuan tersebut tercermin dalam UUD NRI Tahun 1945 dimana sumber daya alam yang dimiliki dan berada di Indonesia digunakan dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Berdasarkan hal tersebut diatas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Apa yang menjadi landasan dan pertimbangan hukum dalam pemusnahan terhadap hasil tindak pidana dengan barang bukti harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrae*)?; dan (2) Bagaimana pertimbangan hukum pemusnahan terhadap hasil tindak pidana dengan barang bukti harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) sudah sesuai dengan prinsip kepastian hukum?

Kemudian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulisakan dianalisis yang digunakan dalam disiplin ilmu hukum untuk menganalisis yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat ditemukan suatu pengertian dalam bahan hukum lainnya.

Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis mendapat jawaban atas permasalahan berkaitan dengan penanganan barang bukti satwa yang dilindungi harimau sumatera dan bagian-bagiannya yang diawali dari: (1) prinsip kemanfaatan; (2) unsur tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi; dan (3) kebebasan hakim dalam memutus perkara dengan memperhatikan unsur kemanfaatan atas barang bukti berupa bagian-bagian satwa yang dilindungi yang berlandaskan asas legalitas.

SUMMARY

Galang Rizki Wandiro, *Criminal Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, January 2018, JUDGE'S JUDICIAL CONSIDERATION AGAINST THE DESTRUCTION OF SUMATRAN TIGER'S EVIDENCE IN THE CRIMINAL ACT ARTICLE 21 UU No. 5 OF 1990 CONCERNING CONSERVATION OF BIOLOGICAL NATURAL RESOURCES AND ITS ECOSYSTEM (Study of court decision No. 44/Pid.B/2016/PN.Agm and decision No. 702/Pid.sus/2015/PN.Jmb)*
Eny Harjati, SH, M.Hum. and Ardi Ferdian, SH., M.Kn.

This thesis on the, the author raised the issue of the legal Considerations Result destruction of criminal acts With the exhibits of the Sumatran tiger (Panthera tigris sumatrae), the choice of theme is effected by the presence of handling against evidence in the form of parts of protected wildlife, which has the force of law remains with the Court ruling and is based upon consideration of the law the judge as the embodiment of the principle of legality, above based on Act No. 5 of year 1990 concerning conservation of natural resources, the ecosystem and Biodiversity. But the handling of evidence that ignore the benefit over evidence protected wildlife here with its parts. These provisions are reflected in the Indonesia Constitution of 1945 in which the natural resources owned and located in Indonesia used and utilized for the prosperity of the people.

Based on the above, this thesis raised the problem formulation: (1) what is the cornerstone and consideration of the law in criminal acts of destruction against the results with evidence of the Sumatran tiger (Panthera tigris peer)?; and (2) how consideration of the law of genocide against the results of the crime with the exhibits of the Sumatran tiger (Panthera tigris peer) is in compliance with the principle of legal certainty?

Later in the writing of this thesis using the methods normative juridical approach, with legislation (the statute approach), a comparative approach (comparative approach) and conceptual approach (conceptual approach). The primary legal materials, secondary, and tertiary obtained penulisan analyzed used in legal disciplines to analyze is contained in legislation, so that an understanding can be found in the legal materials others.

Of research results with the method above, the author gets answers to problems related to the handling of evidence protected wildlife Sumatran tigers and their parts beginning of: (1) the principle of expediency; (2) the elements of a criminal offence against protected wildlife; and (3) the freedom of a judge in a lawsuit by observing the disconnected elements of benefit over evidence in the form of parts of protected wildlife which is based on the principle of legality.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan bagian dari sumber daya alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan aset yang melimpah serta dapat digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sumber daya yang dimiliki dapat digunakan untuk berbagai macam peruntukan secara simultan, tanpa mengurangi daya guna dan manfaat sesuai dengan peruntukannya. Lingkungan dalam hal ini sesuai dengan perwujudan Pancasila serta alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), yang kemudian tertuang dalam batang tubuh konstitusi.¹

Sebelum itu, kekuasaan tertinggi yang ada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berada di tangan rakyat,² sehingga kedaulatan rakyat harus tercermin dalam konsep hak asasi manusia, termasuk dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan baik dan sehat, sebagaimana yang tertuang pula dalam batang tubuh UUD NRI Tahun 1945,³ serta tercermin

¹ Lihat, Indonesia, **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, UUD NRI Tahun 1945, Pasal 33 Ayat (3), tertulis bahwa:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

² *Ibid.*, Pasal 1 Ayat (2), tertulis bahwa:

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”

³ *Ibid.*, Pasal 28H Ayat (1), tertulis bahwa:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Pasal 33 Ayat (4), tertulis bahwa:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

pula dalam konsep demokrasi yang dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) berwawasan lingkungan.⁴

Nusantara, termasuk dalam salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia dengan tingkat endemisme yang tinggi. Dalam tingkatan tersebut, pun dilengkapi dengan keunikan dan eksotisme tersendiri, menempatkan peranan Indonesia sangat penting dalam perdagangan satwa di dunia, sehingga menjadikan negara ini salah satu pemasok terbesar di dunia. Hal ini tentu saja membuka peluang bagi Indonesia untuk memanfaatkan kekayaan tersebut dengan proyeksi pendapatan negara yang cukup besar.⁵

Menyandang sebutan negara *mega-biodiversity*, catatan pusat monitoring konservasi dunia (*the World Conservation Monitoring Centre*) kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia antara lain 3.305 spesies amfibi, burung, mamalia dan reptil. Diantaranya, 31,1% nya endemik – artinya, hanya terdapat di Indonesia; dan 9.9% nya terancam punah. Indonesia memiliki wilayah laut sekitar 5.8 juta km² dengan keanekaragaman hayati mencakup 590 jenis terumbu karang, lebih luas lagi merepresentasikan 37% spesies laut dunia dan 30% jenis mangrove.⁶

Guna memberikan kepastian hukum, peraturan perundang-undangan berkaitan dengan lingkungan hidup, khususnya yang mengatur mengenai satwa yang dilindungi, telah memuat prinsip hukum yang mencerminkan konsepsi perlindungan hukum. Sebagaimana dengan kesepakatan internasional, termasuk

⁴ Jimly Asshiddiqie, **Green Constitution Nuansa Hijau**, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 8

⁵ Wildlife Conservation Society Indonesia Program, **Proyek Perubahan Untuk Keadilan (*Changes For Justice*) Kejahatan Terhadap Satwa Liar Di Indonesia: Penilaian Cepat Terhadap Pengetahuan, Tren, Dan Prioritas Aksi Saat Ini**, USAID, 2015, Hlm. 6

⁶ WWF Indonesia, **Summary of Statagic Plan 2014-2018**, WWF Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 7

repository.ub.ac.id

dalam berbagai segi, dimulai dari pemanfaatan, pelestarian, hingga dengan perlindungan akan kelestariannya terjaga, yang diungkapkan oleh Joseph DiMento, bahwa:⁷

“Law aims to influence behavior in order to promote enviromental quality. It works in parallel with othe onstitutions. It also works according to dynamics that somer theorist would not classify as institutional. Law in teracts sometimes effectively, sometimes awkwardly, sometimescounter productively with other systems that seek to order behaviour and achieve social control, even empowering. But, law is adistinctive institution. A precise meaning of law is less self-evident in the international arena than in national domains. Neither is the import of international law on the global environment stage matter of consensus. Some conclude that the world environment will be sacrificed in the absence of significant new international legal agreements. Other analyst hold that environmental quality is able to improve in spite of the law and that the law is almost irrelevant in achieving environmental goals.”

Sejalan dengan hal tersebut, bahwa manifestasi tertinggi prinsip kedaulatan rakyat adalah konstitusi.⁸ Hal itu menjadi dasar bagi kedudukan konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam negara (*the supreme law of the land*).⁹ Prinsip dasar terbentuknya *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES),¹⁰ sesuai dalam mewujudkan tujuan negara

⁷ Joseph F.C. DiMento, **The Global Environment and International Law**, University of Texas Press Austin, United States of America, 2003, hlm. 7

⁸ Lihat, Indonesia, **Undang-Undang Dasar...** *Op.Cit.*, Pasal 1 Ayat (3), tertulis bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum.”

⁹ Janedjri M. Gaffar, **Politik Hukum Pemilu**, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, hlm. 144

¹⁰ Lihat, Internasional, **Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)**, Article II Fundamental Principles:

1. *Appendix I shall include all species threatened with extinction which are or may be affected by trade. Trade in specimens of these species must be subject to particularly strict regulation in order not to endanger further their survival and must only be authorized in exceptional circumstances.*

2. *Appendix II shall include:*

(a) *all species which although not necessarily now threatened with extinction may become so unless trade in specimens of such species is subject to strict regulation in order to avoid utilization incompatible with their survival; and*

(b) *other species which must be subject to regulation in order that trade in specimens of certain species referred to in sub-paragraph (a) of this paragraph may be brought under effective control.*

3. *Appendix III shall include all species which any Party identifies as being subject to regulation within its jurisdiction for the purpose of preventing or restricting exploitation, and as needing the co-operation of other Parties in the control of trade.*

kesejahteraan. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan dan menjadi pihak dalam konvensi tersebut,¹¹ tertanggal 15 Desember 1978, serta mengesahkan amandemen 1979, CITES 1973,¹² tertanggal 14 Januari 1987.

Sebagai pemegang legitimasi, berdasar kedaulatan rakyat, Pemerintahan Republik Indonesia mewujudkan dengan merumuskannya dalam peraturan perundang-undangan yang ditetapkan melalui politik hukum (*legal policy*) atau garis kebijakan tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum yang lama, dalam rangka mencapai tujuan negara,¹³ guna mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial.

Bertolak belakang dengan proyeksi tersebut, tingkat pengambil keputusan menjadi penyebab utama sehingga kepentingan pelestarian lingkungan hidup yang sering terabaikan.¹⁴ Koesnadi Hardjasoemantri, juga mengemukakan dalam pembangunan dapat menyebabkan resiko-resiko kerusakan pada kemampuan dan fungsi dari sumber daya alam dan lingkungan hidup.¹⁵ Guna menjaga agar

4. *The Parties shall not allow trade in specimens of species included in Appendices I, II and III except in accordance with the provisions of the present Convention.*

¹¹ Lihat, Indonesia, **Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora**, Keppres RI Nomor 43 Tahun 1987, Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 51.

¹² Lihat, Indonesia, **Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora**, Keppres RI Nomor 43 Tahun 1987, Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 5.

¹³ M. Mahfud MD, **Politik Hukum Di Indonesia**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 1

¹⁴ Lihat, Rachmat Witoelar, **Pengelolaan Lingkungan Nasional dan Rencana Tindak Lanjut Pembangunan Berkelanjutan**, Makalah disampaikan Seminar Nasional Pengelolaan Lingkungan dalam Rangka Implementasi Agenda-21, yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 16 Juli 2005, hlm. 9, dalam Soedarmadji, **Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pencemaran Air yang Disebabkan oleh Limbah Cair dari Industri**, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya, 2009, hlm. 1-2

¹⁵ Lihat, Koesnadi Hardjasoemantri, **Pokok-Pokok Pemikiran Hukum Lingkungan dan Implementasinya terhadap Keseimnamgam Ekosistem Indonesia**, dalam Kumpulan Tulisan

pemanfaatan sumber daya alam hayati secara berkelanjutan serta berwawasan lingkungan, maka diperlukan langkah konservasi. Mengingat dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta dapat menjadi dasar pertimbangan utama dalam pembangunan bangsa. Oleh karenanya, Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menetapkan dasar hukum, salah satunya mengatur dasar hukum atas satwa yang dilindungi, berupa Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE).¹⁶

Berdasar kondisi tersebut, tertbitnya UU KSDAHE untuk mengatur dan memberikan payung hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, pun dasar hukum penggolongan atas jenis satwa yang dilindungi.¹⁷ Limitasi dan klasifikasi kejahatan terhadap satwa yang dilindungi tercantum dalam dasar hukum tersebut, mulai dari menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut hingga memperniagakannya. Kejahatan tersebut dikenal dengan istilah *Wildlife Crime*.¹⁸

Hukum dan Bencana Alam di Indonesia, kerjasama JICA-Kedubes Jepang di Jakarta, 2002, hlm. 118, dalam Soedarmadji... *Op.Cit.*, hlm. 2

¹⁶ Lihat, Indonesia, **Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya**, UU Nomor 5 Tahun 1990, Lembaran Negara Nomor 49 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419.

¹⁷ *Ibid.*, pasal 20 ayat (2), tertulis bahwa:

“Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan dalam:

- a. Tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan;
- b. Tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang.”

¹⁸ *Ibid.*, pasal 21 ayat (2), tertulis bahwa:

“Setiap orang dilarang untuk:

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

Sebanyak 236 jenis satwa yang dilindungi,¹⁹ terbagi menjadi 7 golongan, diantaranya (i) Mamalia (menyusui) sebanyak 70 jenis; (ii) Aves (burung) sebanyak 93 jenis; (iii) Reptilia (melata) sebanyak 30 jenis; (iv) Insecta (serangga) sebanyak 29 jenis; (v) Pisces (ikan) sebanyak 7 jenis; (vi) Anthozoa sebanyak 1 jenis; serta (vii) Bivalvia sebanyak 13 jenis.²⁰

Problematika mengenai kejahatan terhadap satwa dan tumbuhan liar yang dilindungi (*wildlife crime*) menjadi isu yang menjadi sorotan dunia, kejahatan ini pula termasuk salah satu industri kriminal terbesar di dunia, setelah narkoba, penipuan dan perbudakan manusia.²¹ Meski data empiris tidak banyak tersedia, terdapat bukti kuat bahwa kejahatan ini meningkat seiring dengan peningkatan pemenuhan kesejahteraan ekonomi. Terutama, tindak kejahatan terhadap satwa langka dan dilindungi, dimana sebagai pemegang peran penting, termasuk dalam kategori “*extra ordinary crime*”.²² Kejahatan tersebut berdampak luar biasa dan luas terhadap keberlangsungan hidup aneka ragam ekosistem yang ada di Indonesia. Perdagangan spesies langka dan dilindungi, termasuk bagian tubuhnya merupakan kejahatan yang terstruktur, sistematis dan *massive*, termasuk bisnis yang menguntungkan yang melibatkan banyak pelaku, mulai dari pemburu, penampung, tukang offset (*taxidermist*) hingga eksportir, yang membentuk suatu

d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.”

¹⁹ Lihat, Indonesia, **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa**, PP Nomor 7 Tahun 1999, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3803.

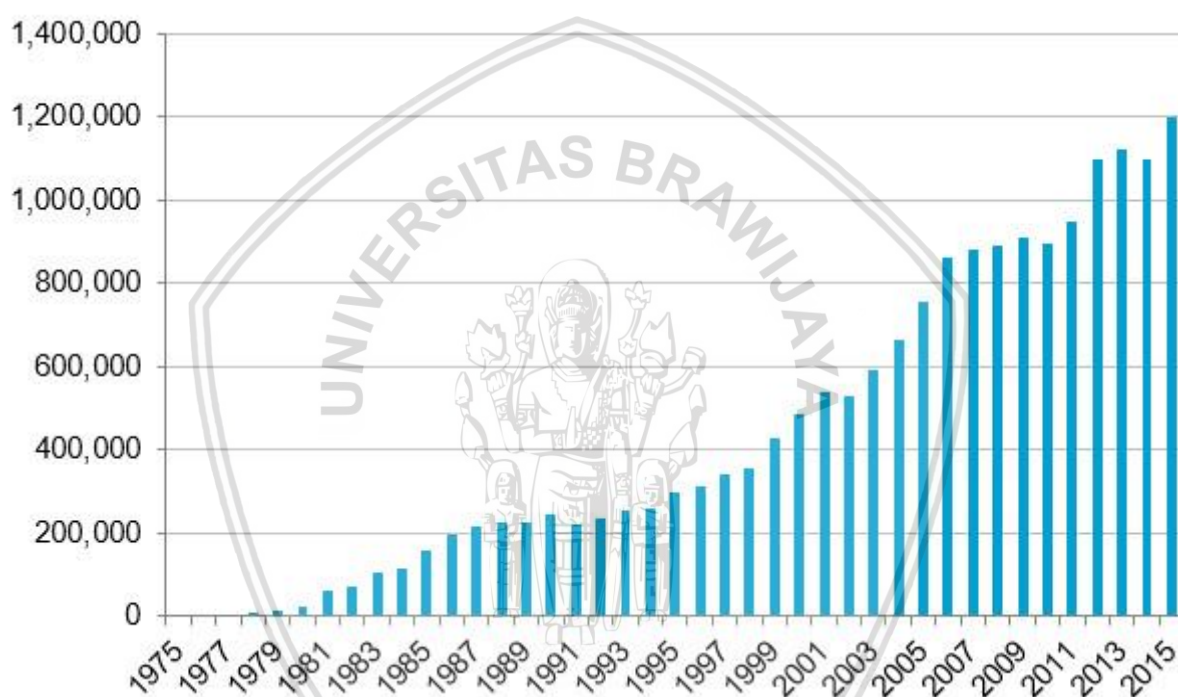
²⁰ *Ibid.*, Lampiran PP tertanggal 27 Januari 1999.

²¹ Lihat, Wildlife Conservation Society Indonesia Program, **Proyek Perubahan Untuk Keadilan (*Changes For Justice*) Kejahatan Terhadap Satwa Liar Di Indonesia: Penilaian Cepat Terhadap Pengetahuan, Tren, Dan Prioritas Aksi Saat Ini**, USAID, 2015, Hlm. 6

²² Yurizal, **Reformulasi Kewenangan Polri dan PPNS dalam Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup**, Media Nusa Creative, Malang, 2017, hlm. 11

mata rantai perdagangan tersendiri. Menurut analisis WWF dan TRAFFIC nilai perdagangan tumbuhan dan satwa secara internasional (termasuk perdagangan ilegalnya) mencapai US\$ 159 miliar per tahun. Khusus untuk satwa yang dilindungi, nilai perdagangannya di tingkat internasional mencapai US\$ 20 miliar per tahun.²³

Grafik 1.1
Jumlah Transaksi Perdagangan Satwa dan Tumbuhan di Seluruh Dunia²⁴



Sumber: Data Sekunder, *Convention on International Trade in Endangered Species*

Selain itu, kerugian atas *wildlife crime* meningkat di setiap tahunnya. Hal tersebut terbukti atas meningkatnya kasus kejahatan yang diungkap oleh *Protection of Forest and Fauna* (ProFauna), yang merilis pada semester pertama tahun 2015 perdagangan satwa liar yang dilindungi di Indonesia menunjukkan peningkatan cukup signifikan dibandingkan tahun 2014. Jika pada rentang bulan

²³ Pokja Kebijakan Konservasi. 2008. *Konservasi Indonesia, Sebuah Potret Pengelolaan & Kebijakan*. Jakarta

²⁴ Lihat, The Trade Data Dashboards (online), <https://www.cites.org/eng/disc/what.php>, diakses pada 10 Februari 2018

Januari-Juni 2014 sedikitnya ada 22 kasus perdagangan dan perburuan satwa liar yang berhasil diungkap oleh aparat penegak hukum, pada rentang bulan yang sama di tahun 2015 terdapat setidaknya 37 kasus. Ini artinya ada peningkatan hampir 70%.²⁵ Dari 37 kasus tersebut, terbagi ke dalam 27% (10 kasus terjadi pada burung paruh bengkok); 11% (4 kasus melibatkan hewan primata); 22% (8 kasus melibatkan kucing besar); 8% (3 kasus melibatkan trenggiling); serta 27% (10 melibatkan satwa laut, antara lain penyu, hiu, parimanta, dll). Beranjak dari jumlah dan jenis *wildlife crime* tersebut, membuktikan bahwa satwa yang dilindungi diminati pasaran dan membutuhkan perhatian khusus.

Fokus utama atas kejahatan ini, bagaimana proses dan perkembangan atas penanganannya. Sangat sedikit penegakan hukum atas kejahatan terhadap satwa liar di Indonesia. Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa kasus kejahatan terhadap satwa liar rata-rata 100 kasus per tahun antara tahun 2005-2009, yang kemudian turun ke angka 37 kasus di tahun 2010 dan 2012, dan hanya 5 kasus pada tahun 2013. Penurunan ini dapat menyesatkan, dengan estimasi penyelundupan satwa liar diperkirakan meningkat. Pemberantasan perdagangan satwa liar di Indonesia terhalang oleh terbatasnya kemauan politis dan kolaborasi antara lembaga penegakan hukum dan pelaksanaan prosedur penegakan hukum yang tidak tepat.²⁶

Di wilayah Jawa Timur sendiri, Beberapa kasus-kasus perdagangan satwa liar yang terjadi selama bulan Januari-Juni 2015 diantaranya, pada tanggal 23 Januari, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur bersama Polisi

²⁵ Lihat, Kominfo Provinsi Jawa Timur, **Perdagangan Satwa Dilindungi Meningkat 70%** (online), <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/45766>, diakses pada tanggal 6 Februari 2018

²⁶ Lihat, Wildlife Conservation Society Indonesia Program, **Proyek Perubahan Untuk Keadilan (*Changes For Justice*)...** *Op.Cit.*, hlm. 5

Kehutanan, berhasil mengamankan seorang tersangka penjual satwa liar, dengan menyita 1 lutung jawa sudah mati, Nuri merah kepala hitam, Kakatua seram, 2 Kakatua kecil jambul kuning, dan 2 Kangkareng perut putih. Pada tanggal 12 Februari Polres Madiun mengamankan 1 Harimau Sumatera yang sudah diawetkan, 1 set kulit Harimau, 1 tengkorak kepala Harimau, 1 kepala Rusa yang sudah diawetkan, dan 1 awetan Penyusut Sisik utuh. Satwa-satwa itu dijual dengan harga antara Rp 25 juta - Rp 45 juta. Pada tanggal 28 April Direktorat V Tiindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri menggerebek sebuah gudang penampung dan pengemasan trenggiling di Medan Deli dan menemukan 96 ekor Trenggiling hidup, 5.000 kilo gram daging trenggiling beku dan 77 kg sisik Trenggiling. Akibat tindakan pelaku, negara berpotensi mengalami kerugian hingga Rp 23,56 miliar.²⁷

Data yang dihimpun atas hasil tindakan kejahatan terhadap satwa yang dilindungi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia merilis data, diantaranya:

Tabel 1.1
Rekapitulasi Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar Ilegal Tahun 2015²⁸

No.	Jenis	Jumlah	Keterangan
1.	Rusa	6 lembar	Kulit utuh 1 ekor
2.	Beruang Madu	1 lembar	Potongan kulit
3.	Macan Tutul	1 lembar	Kulit lengkap 1 ekor
4.	Macan Tutul	3 lembar	Potong kulit
5.	Ular Sanca	31 lembar	Kulit 1 ekor lengkap dan kepala
6.	Harimau	2 lembar	Kulit lengkap dengan kepala
7.	Harimau	2 lembar	Potongan kulit anakan
8.	Harimau	1 lembar	Kulit lengkap 1 ekor anakan
9.	Rusa	2 lembar	Potongan kulit

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Lihat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, **Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015**, Pusat Data dan Informasi KemenLHK, September 2016, hlm. 236

No.	Jenis	Jumlah	Keterangan
10.	Macan Tutul	2 ekor	Opsetan kondisi lengkap
11.	Macan Dahan	1 ekor	Opsetan setengah badan
12.	Macan Kumbang	1 ekor	
13.	Beruang madu	2 ekor	
14.	Rusa	2 ekor	
15.	Kucing Mas	1 ekor	Opsetan lengkap
16.	Burung Cendrawasih	2 ekor	
17.	Burung Bayan	1 ekor	
18.	Burung Nuri Merah Kepala Hitam	2 ekor	
19.	Macan	8 ekor	Tengkorak kepala
20.	Beruang	1 ekor	
21.	Kambing Hutan	4 ekor	
22.	Rusa	3 buah	Tengkorak kepala lengkap
23.	Satwa liar	217 buah	Tulang belulang
24.	Elang Laut	1 ekor	Hidup
25.	Burung Jalak Bali	1 ekor	
26.	Owa dan Lutung	5 Ekor	
27.	Jenis Burung Dilindungi	10 Ekor	
28.	Bagian Burung	30 Item	20 Paruh Enggarang, 10 Taring
29.	Jalak Bali	2 Ekor	Hidup
30.	Kura-kura moncong babi	8.860 Ekor	Hidup dan telah dilepasliarkan
31.	Cendrawasih	11 Ekor	
32.	Tupai terbang	100 Ekor	
33.	Kakaktua Raja	4 Ekor	
34.	Biawak	25 Ekor	

Sumber: Data Sekunder, *Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan*

Tabel 1.2
Rekapitulasi Operasi Pencegahan dan Pengamanan Hutan²⁹

No.	Jenis Operasi	2015		2016	
		Jumlah	Hasil	Jumlah	Hasil
1	Pemulihan kawasan hutan	27	3.072,198 Ha	36	2.431.892,85 Ha
2	Peredaran Tumbuhan dan Satwa liar	6	21 Satwa dilindungi	65	6.122 ekor satwa
					4.577 lembar kulit satwa
					711 buah bagian satwa
3	Pembalakan Liar	16	4.240 batang	40	5.329 batang
					1.227,75 m ³

Sumber: Data Sekunder, *Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan*

²⁹ Lihat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, **Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016**, Pusat Data dan Informasi KemenLHK, Desember 2017, hlm. 302

Kemudian, data dari Direktorat Jenderal Bea Cukai terhadap penyelundupan CITIES di Indonesia, sebagai berikut:

Tabel 1.3
Data Penindakan DJBC terhadap penyelundupan CITES di Indonesia³⁰

No.	Kantor	Jenis		Komoditi	Jumlah	Keterangan
		Impor	Ekspor			
1	KPPBC Juanda		v	Freshfish	2 box	dengan sengaja memberitahukan jumlah dan jenis barang tidak sesuai dengan dokumen pemberitahuan pabean.
				Trenggiling yang ditutupi freshfish	43 box	
2	KPPBC Mataram	v		Burung	33 pcs	dengan cara membawa burung tersebut sebagai barang bawaan penumpang/ barang tentengan
3	KPU BC Tanjung Priok	v		bagian kaki katak yang telah dikuliti dalam keadaan beku	1637 pcs	dengan memberitahukan jenis barang secara tidak benar. mengeksport barang tanpa dilengkapi dokumen.
				Nukleotida Spesies Phantera Tigris (berdasarkan hasil uji lab DNA Forensik Lembaga Eijkman)	390 pcs	
				Tempurung kura-kura	109 pcs	
				Dada kura-kura utuh	75 pcs	
				Dada kura-kura hancur	50 pcs	
				Akar tunjuk langit	77 pcs	
4	KPPBC Soetta	v		kadal Urosmatyx ornate	8 pcs	dimasukkan ke dalam koper dengan ditutupi pakaian
				kadal Varanus salvator	1 pcs	
				kadal Cameleon	28 pcs	
				kura-kura Golden greek	35 pcs	
				kura-kura Sulkata	24 pcs	
				Ular	6 pcs	
				kadal berduri	37 pcs	dimasukkan ke dalam karton dengan ditutupi dengan rempah-rempah (jahe)
				kadal soapayung	2 pcs	
				biawak bunga tanjung	3 pcs	
				biawak leher merah	2 pcs	
				Genus siebenrockiella	1 pcs	
				ular sanca	19 pcs	

Sumber: Data Sekunder, *Subdit Intelijen Direktorat P2 DJBC 2015*

³⁰ Laporan Utama: Peran Bea Cukai dalam Mendukung CITIES, Jaga Alam, lindungi Flora dan Fauna Indonesia, Volume 47, Nomor 7, Juli 2015, hal. 14

Dari data tersebut, kerugian yang dialami oleh negara atas *wildlife crime* menimbulkan efek domino kerusakan di berbagai sektor, mencakup ekosistem, kepunahan jenis endemik, ancaman penyakit, hingga kerugian perekonomian yang cukup besar. Dari segi kerusakan ekosistem, *wildlife crime* pelaku kejahatan telah mengancam kerusakan ekosistem yang telah terbentuk dan berlangsung dengan waktu yang tidak singkat. Hal ini terjadi, dengan perambahan ke dalam kawasan inti dari taman nasional, kemudian merusak tumbuhan liar secara sembarangan dan/atau memburu satwa yang dilindungi secara sembarangan. Selanjutnya, kerusakan lanjutan disebabkan terganggunya rantai kehidupan atas perburuan satwa yang dilindungi. Satwa tersebut, tidak jarang, sebagai posisi pemangsa utama (*top predator*). Dengan hilangnya peran tersebut di alam liar, maka populasi pada satwa dalam tingkatan bawahnya tidak terkontrol dalam proses rantai makanan, sehingga terjadi *over-population* yang berdampak pada rusaknya ekosistem, hingga di ambang kepunahan.

Kejahatan atas satwa liar yang dilindungi dalam jangka panjang akan mengakibatkan kepunahan atas jenis endemik (khas), baik tumbuhan maupun satwa di Indonesia. Dalam beberapa dekade belakangan ini, para ahli mengambil kesimpulan bahwa Harimau Jawa (*Panthera tigris sondaica*) dan Harimau Bali (*Panthera tigris balica*) telah dinyatakan punah dari Indonesia. Saat ini satwa yang dilindungi dengan status diambang kepunahan diantaranya Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), orang utan (*Pongo pygmaeus*), Badak Jawa (*Rhinoceros sondaicus*), Badak Sumatera (*Dicerorhinus sumatrensis*) dan Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatrensis*). Ditambah, ancaman penyakit dari perdagangan ilegal di pasar satwa di lingkungan manusia yang berpotensi

menyebarkan kepada satwa lain, bahkan berpotensi tinggi pula menularkan penyakit kepada manusia.

Menjadi sangat penting dari *wildlife crime* ini adalah timbulnya kerugian ekonomi. Menurut Kementerian Kehutanan di tahun 2010 saja, pendapatan negara mengalami kerugian atas ekspor satwa liar dengan berbagai jenis yang menghasilkan nilai ekspor sekitar Rp. 2.918.840.600,00, termasuk dengan nilai ekspor yang cukup besar dari ekspor ikan arwana sejumlah Rp. 1,989 miliar.³¹ Kemudian, di tahun 2015, perdagangan ke luar negeri/eksport satwa dan tumbuhan liar dari alam menghasilkan devisa sebesar Rp. 5,31 Triliun dimana kontribusi nilai ekspor dari satwa menghasilkan perkiraan devisa sebesar Rp. 4,56 Triliun dan kontribusi dari nilai beberapa jenis tumbuhan menghasilkan perkiraan devisa sebesar Rp. 744,57 Milyar. Sedangkan PNBP dari menangkap atau mengambil atau mengangkut tumbuhan dan satwa liar tahun 2015 sebesar Rp. 14,54 Milyar.³²

Masih belum berakhir, keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia merupakan aset negara yang menjadi tanggung jawab bersama untuk dikelola secara optimal dan berkelanjutan. Pada tahun 2016, perdagangan ke luar negeri/eksport tumbuhan dan satwa liar dari alam menghasilkan devisa sebesar Rp. 6,54 triliun. Sedangkan dari menangkap/mengambil/mengangkut sebesar Rp. 15,51 milyar.³³

³¹ Kementerian Kehutanan, **Buku Statistik Kehutanan 2011**, Kementerian Kehutanan, Jakarta, 2012, hlm. 69

³² Lihat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, **Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan Tahun 2015...Op.Cit.**, hlm. 69

³³ Lihat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, **Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan Tahun 2016...Op.Cit.**, hlm. 117

Bagaimanapun, angka yang tertera di tahun 2015 dan 2016 tersebut hanya mewakili perdagangan legal, sementara potensi ekonomi yang hilang dan berputar dalam perdagangan ilegal jauh lebih besar.³⁴ Dalam laporan *Protection of Forest and Fauna* (ProFauna), diperkirakan bahwa omset perdagangan atas satwa ilegal di dunia mencapai US\$ 10-20 miliar/tahun.³⁵ Angka tersebut merupakan omset ilegal kedua terbesar setelah bisnis narkoba, di Indonesia sendiri omset perdagangan satwa liar mencapai Rp. 9 triliun/tahun.³⁶

Permasalahan hukum atas lingkungan hidup menduduki tempat perhatian dan sumber pengkajian secara akademis yang tidak berujung, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional, karena hal ini merupakan hal yang mendesak dalam mengatur keberlangsungan umat manusia dalam kaitannya dengan kebutuhan sumber daya hayati, dengan tetap menjaga kelestarian dan keberlanjutan itu sendiri.³⁷ Pun demikian dengan *wildlife crime* menjadi isu sorotan dunia, dimana termasuk salah satu industri kriminal terbesar di dunia, setelah narkoba, penipuan dan perbudakan manusia.³⁸ Terutama, tindak kejahatan terhadap satwa langka dan dilindungi, termasuk dalam kategori “*extra ordinary crime*”.³⁹

Kejahatan terhadap satwa liar di Indonesia mengalami peningkatan, seiring dengan meningkatnya tren permintaan global itu sendiri. Dalam

³⁴ Fathi Hanif, **Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum dan Perundang-Undangan**, Indonesian Center for Environmental Law, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol.2 Nomor 2, 2015, hlm. 44

³⁵ IWGFF & PPAK. **Panduan Pelatihan Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan melalui pendekatan anti korupsi dan anti pencucian uang**, PPAK-IWGFF, Jakarta, 2012, hlm. 20

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Yurizal, **Reformulasi Kewenangan Polri dan PPNS dalam Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup**, Media Nusa Creative, Malang, 2017, hlm. 5

³⁸ Wildlife Conservation Society Indonesia Program, **Proyek Perubahan Untuk Keadilan (*Changes For Justice*) Kejahatan Terhadap Satwa Liar Di Indonesia: Penilaian Cepat Terhadap Pengetahuan, Tren, Dan Prioritas Aksi Saat Ini**, USAID, 2015, Hlm. 6

³⁹ Yurizal, **Reformulasi Kewenangan Polri dan PPNS... *Op.Cit.***, hlm. 11

perkembangannya, *wildlife crime* saat ini merupakan kejahatan terorganisasi (*organized crime*) dan lintas negara (*transnational crime*), juga berbasis pada elektronik (*cyber crime*).⁴⁰ Perdagangan spesies langka dan dilindungi, termasuk bagian tubuhnya merupakan kejahatan yang terstruktur, sistematis dan *massive*, termasuk bisnis yang menguntungkan yang melibatkan banyak pelaku yang membentuk suatu mata rantai tersendiri. Identifikasi serta kualifikasi peran pihak yang terlibat, terdiri atas pemburu, tukang offset (*taxidermist*), penadah/pengepul, bandar, dan pemodal/cukong.⁴¹ Selama ini upaya penegakkan hukum terhadap pelaku perdagangan satwa liar di Indonesia masih menggunakan cara konvensional, menangkap pelaku di tingkat lapangan seperti pemburu dan pedagang pengumpul (*follow the suspect*). Hampir tidak pernah terungkap, siapa pemain besarnya.⁴²

Kinerja aparat penegak hukum, khususnya yang terlibat dalam peradilan, yakni jaksa dan hakim dalam menangani tindak kejahatan ini merupakan faktor esensial harus diperhatikan. Menurut Raynaldo Sembiring dan Wenni Adzkia, penelitian yang dilakukan berkaitan dengan tuntutan dari jaksa maupun putusan hakim atas *wildlife crime*, sangat jarang dan minim.⁴³ Mengacu pada teori sistem peradilan pidana, merupakan bagian dari sistem dalam masyarakat dalam

⁴⁰ Raynaldo Sembiring dan Wenni Adzkia, **Memberantas Kejahatan Atas Satwa Liar: Refleksi Atas Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990**, Indonesian Center for Environmental Law, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol.2 Nomor 2, 2015, hlm. 58

⁴¹ T.J. Gunawan, **Konsep Pidana Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi**, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm. 156

⁴² Chik Rini, **Pelaku Kejahatan Satwa Liar Dilindungi Bakal Dijerat Undang-Undang Pencucian Uang** (*online*), Mongabay, <http://www.mongabay.co.id/2017/02/05/pelaku-kejahatan-satwa-liar-dilindungi-bakal-dijerat-undang-undang-pencucian-uang/>, diakses pada tanggal 07 Februari 2018

⁴³ Raynaldo Sembiring dan Wenni Adzkia, **Memberantas Kejahatan Atas Satwa Liar...** *Op.Cit.*, hlm. 65

menanggulangi masalah kejahatan,⁴⁴ pun lembaga kejaksaan bahkan kekuasaan yudikatif memiliki faktor fundamental yang perlu dikritisi dan diawasi kinerjanya.

Berangkat dari hal tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah melakukan telaah terhadap beberapa putusan berkaitan dengan kejahatan terhadap satwa liar. Dari penelaahan tersebut, terhimpun dan pengolahan atas putusan *wildlife crime* tersebut, memiliki beberapa catatan, diantaranya:⁴⁵

1. Sekitar 80%, terdakwa merupakan pelaku lapangan (pemburu) yang berprofesi sebagai supir, petani, nelayan, dan pelajar;
2. Sekitar 80% pula, terdakwa berpendidikan rendah (dari tidak lulus Sekolah Dasar hingga pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas);
3. Perkara dengan terdakwa berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberikan sanksi lebih berat dibandingkan dengan profesi lainnya, dengan rentang pidana kurungan 4 sampai 8 bulan dan dengan pidana denda sebesar 10-20 juta rupiah;
4. Perkara yang dilakukan dengan penyertaan (*deelneming*) diberikan sanksi lebih berat dibandingkan dengan dasar profesi, dengan rentang pidana kurungan 6-10 bulan dan dengan pidana denda sebesar 10-50 juta rupiah;
5. Putusan pidana badan paling berat adalah pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, pada kasus perdagangan 53 moncong hiu dan 17 ekor penyu;
6. Putusan pidana dengan paling besar sebesar 100 juta rupiah, oleh Pengadilan Negeri Denpasar pada kasus penyelundupan 16 ekor penyu;
7. Ratio tuntutan penuntut umum dengan putusan hakim terkait pidana badan adalah 3:2; serta
8. Ratio tuntutan penuntut umum dengan putusan hakim terkait pidana denda adalah 2;1.

Memasuki era reformasi, persoalan semakin memburuk. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber

⁴⁴ Mardjono Reksodiputro, **Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran penegak Hukum Melawan Kejahatan)**, sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita, **Sistem Peradilan Pidana**, Kencana Prenada, Jakarta, 2011, hlm. 3

⁴⁵ Lihat, Satuan Tugas Sumber Daya Alam Lintas Negara, **Pedoman Penanganan Perkara terkait Satwa Liar**, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Bogor, Januari 2015, hlm. 17, dalam Raynaldo Sembiring dan Wenni Adzkia, **Memberantas Kejahatan Atas Satwa Liar... Op.Cit.**, hlm. 66

Daya Alam⁴⁶ yang menghendaki untuk dilakukan pengkajian ulang terhadap peraturan perundang-undangan agar selaras dengan Konstitusi, tetapi dalam praktiknya pemerintah malah semakin banyak membuat undang-undang sektoral tanpa melakukan kaji ulang terlebih dahulu,⁴⁷ termasuk terbitnya Undang-Undang tentang Kehutanan.⁴⁸

Dalam karya ilmiah ini, konflik hukum yang terjadi atas penanganan barang bukti hasil dari *wildlife crime*. Perumusan perbuatan secara jelas dan tepat dalam perundangan menjadi penting karena dalam negara yang menggunakan undang-undang sebagai sumber hukum tentu saja tidak terlepas dari penafsiran. Apabila undang-undang tidak memberikan suatu definisi yang jelas maka akan banyak sekali penafsiran yang dapat digunakan dan akan menimbulkan ketidakpastian hukum⁴⁹ sehingga berdasarkan orientasi tersebut juga tidak akan mewujudkan kemanfaatan, menurut teori kemanfaatan itu sendiri hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.⁵⁰

Dalam sistem peradilan pidana, didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di sistem hukum pidana diatur dengan

⁴⁶ Lihat, Indonesia, **Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam**, TAP MPR RI NOMOR IX/MPR/2001, Pasal 5 ayat (2)

⁴⁷ Yance Arizone, **Perkembangan Konstitusionalitas Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi**, Jurnal Konstitusi, Vol. 8 Nomor 3, Juni 2011, hlm. 265

⁴⁸ Lihat, Indonesia, **Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kehutanan**, UU Nomor 41 Tahun 1999, Lembaran Negara Nomor 167 Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888

⁴⁹ Nella Sumika Putri, **Hukum Pidana Dalam Perspektif (Pembatasan Penafsiran Hakim Terhadap Perumusan Tindak Pidana Yang Tidak Jelas Melalui Yurisprudensi)**, Pustaka Larasan, Jakarta hlm. 41

⁵⁰ Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, **Hukum Sebagai Suatu Sistem**, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 79-80.

jelas di Indonesia.⁵¹ Tahapan yang ada penanganan tindak pidana yang diatur dalam KUHAP menunjukkan bahwa penanganan terhadap barang bukti pun dilakukan dan memiliki kedudukan yang penting, sehingga dalam keseluruhan tahapan tersebut harus dilakukan secara benar, profesional, proposional dan akuntabel, serta memiliki dasar hukum. Barang bukti adalah barang-barang yang kepunyaan dan/atau patut diduga milik tersangka atau terdakwa yang diperoleh karena kejahatan atau barang-barang yang sengaja dilakukan untuk melakukan kejahatan dan/atau hasil dari suatu tindak kejahatan itu sendiri.⁵² Hal tersebut tersurat dalam:

Pasal 43

- (1) Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara.
- (2) Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang dipergunakan oleh siapapun juga.

Pasal 45

- (1) Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang **dapat lekas rusak** atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut :
 - a. **apabila perkara masih ada ditangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya;**
 - b. **apabila perkara sudah ada ditangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.**
- (2) Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti.
- (3) Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian dari benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

⁵¹ Lihat, Indonesia, **Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Hukum Acara Pidana**, UU Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209

⁵² Monang Siahaan, **Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana**, PT Grasindo, Jakarta, 2017, hlm. 37

- (4) **Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.**

Demikian pula penanganan atas barang bukti atas hasil *wildlife crime*, dalam UU KSDAHE diatur dalam

Pasal 24

- (1) Apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, tumbuhan dan satwa tersebut ***dirampas untuk negara***.
- (2) Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi atau bagian-bagiannya yang dirampas untuk negara dikembalikan ke habitatnya atau diserahkan kepada lembaga-lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dari satwa, kecuali apabila keadaannya sudah tidak memungkinkan ***untuk dimanfaatkan*** sehingga dinilai lebih baik dimusnahkan.

Sedangkan dalam UU Kehutanan pun ikut mengatur mengenai *wildlife crime*, tercantum dalam:

Pasal 78

- (13) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) adalah ***kejahatan***, dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran.
- (15) Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan/atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini ***dirampas untuk Negara***.

Pasal 79

- (1) Untuk negara berupa hasil hutan dan barang lainnya baik berupa temuan dan atau rampasan dari hasil kejahatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ***dilelang untuk Negara***.

Dalam tataran norma, instrumen hukum dan perundang-undangan di tingkat internasional dan nasional telah banyak mengatur perlindungan jenis satwa dan tumbuhan yang terancam punah. Namun, dalam kenyataan, masih banyak kasus kejahatan yang terjadi berkaitan dengan perburuan dan perdagangan satwa yang dilindungi. Di sisi lain, kasus *wildlife crime* yang sudah diproses ke pengadilan belum melahirkan satu putusan pun yang signifikan dan bisa menimbulkan efek

jera (*deterrent effect*). Faktanya banyak putusan pengadilan yang memutus vonis atau putusan pengadilan masih rendah antara 4 bulan hingga 1,5 tahun penjara,⁵³ termasuk barang bukti yang dalam penanganannya dilakukan pemusnahan.⁵⁴ Kondisi ini tentu saja tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan, lembaga peradilan belum mempertimbangkan aspek kerugian ekologi yang ditimbulkan akibat matinya atau hilangnya satwa yang dilindungi dan endemik Indonesia.

Dari berbagai putusan majelis hakim pengadilan yang menangani *wildlife crime*, terkesan cenderung untuk melakukan pemusnahan barang bukti atas tindak kejahatan tersebut dan menimbulkan pengabaian atas nilai pemanfaatan untuk kesejahteraan terhadap warga negara itu sendiri di masa yang akan datang. Dengan demikian, dalam peraturan perundang-undangan (*das sein*) yang telah disebut sebelumnya terjadi konflik norma. Sehingga, menjadi menarik perhatian dan fokus penelitian berkaitan penggunaan dasar hukum dan asas yang digunakan dalam penanganan barang bukti atas kejahatan terhadap satwa yang dilindungi di Indonesia.

Dalam penulisan ini, penelitian atas pertimbangan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap terhadap barang bukti atas *wildlife crime*, yakni Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*). Dimana satwa tersebut termasuk satwa yang dilindungi,⁵⁵ yang telah memenuhi unsur pidana dalam peraturan

⁵³ WWF Indonesia, **Panduan Kelestarian Ekosistem untuk Pemanfaatan Panas Bumi**, WWF Indonesia, Jakarta 2014, hlm. 34

⁵⁴ Fathi Hanif, **Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum dan Perundang-Undangan**, Indonesian Center for Environmental Law, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol.2 Nomor 2, 2015, hlm. 40

⁵⁵ Lihat, Indonesia, **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa**, PP Nomor 7 Tahun 1999, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3803, nomor 52

perundang-undangan yang berlaku.⁵⁶ Kemudian diklasifikasikan atas penanganan barang bukti atas hasil tindak kejahatan terhadap satwa yang dilindungi (harimau/ *Panthera tigris sumatrae*), antara lain:

1. 44/Pid.B/2016/PN.Agm. barang bukti yang ditetapkan berupa 1 (satu) lembar kulit harimau sumatera yang telah di-offset beserta tulang belulangnya, dengan mengingat, memperhatikan pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a dan huruf d UU KSDAHE *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, kemudian ditetapkan untuk dimusnahkan.
2. 702/PID.Sus/2015/PN.Jmb. barang bukti yang ditetapkan berupa 1 (satu) buah awetan (*offset*) harimau, dengan mengingat, memperhatikan pasal 21 ayat (2) huruf d Jo pasal 40 ayat (2) UU KSDAHE *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, hanya ditetapkan untuk dirampas untuk Negara melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jambi.

Dari dua putusan tersebut diatas, terdapat kesamaan atas barang bukti, yang dimana kedua barang bukti ialah harimau sumatera. Kemudian terdapat juga perbedaan atas barang bukti, dalam hal ini satwa yang dilindungi dalam keadaan mati beserta dengan bagian tubuh, mulai dari tulang, kulit, bahkan dalam keadaan yang telah diawetkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah hukum yang berlaku dengan prinsip kebebasan hakim dalam memutus perkara sudah

⁵⁶ Lihat, Indonesia, **Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya**, UU Nomor 5 Tahun 1990, Lembaran Negara Nomor 49 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419, Pasal 21 (2) huruf b: *menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati*;

memenuhi asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan hukum dengan amar putusan yang berbeda-beda.

Berpangkal pada realitas identifikasi tersebut, problematika *wildlife crime* yang semakin meningkat serta kerugian yang dialami oleh negara, serta nilai pemanfaatannya, keberlanjutan lingkungan hidup terhadap penanganan barang bukti atas hasil tindak kejahatan terhadap satwa yang dilindungi di Indonesia. Mengingat urgensi pada penanganan barang bukti tersebut maka penulis mengangkat penelitian dengan judul **PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PEMUSNAHAN BARANG BUKTI HARIMAU SUMATERA DALAM TINDAK PIDANA PASAL 21 UU NO.5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA (Studi putusan pengadilan negeri No. 44/Pid.B/2016/PN.Agm dan putusan No. 702/Pid.sus/2015/PN.Jmb).**

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1	Tri Rahayu, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015)	Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Dari Perdagangan Liar (Studi pada <i>Wildlife Rescue Centre</i> , Pengasih Kulon Progo Yogyakarta)	1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap perdagangan satwa secara liar? 2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap satwa dari perdagangan liar di <i>Wildlife Rescue Centre</i> , Pengasih, Kulon Progo, Yogyakarta?	Penelitian ini untuk mengetahui bentuk perlindungan terhadap perdagangan satwa liar yang dilindungi
2	Rema Aldera Fakultas Hukum Universitas	Analisis Pertanggungjawaban Pidana	1. Bagaimanakah Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku jual beli satwa langka secara illegal ?	Penelitian ini mengfokuskan pada pertanggungjawabann pelaku jual beli satwa

	Lampung (2015)	Terhadap Pelaku Jual Beli Satwa langka secara ilegal (Studi Putusan Perkara Nomor :357/pid.b/2011/PN.KB)	2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana perdagangan satwa langka secara ilegal (Studi putusan perkara No.357/Pid.B/2011/PN.KB) ?	langka secara ilegal
3	Andrew Pranata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (2013)	Implementasi Pasal 21 Ayat (2) Jo Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi (Studi Di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur)	1. Bagaimana penerapan dari Pasal 21 ayat (2) Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya terhadap tindak pidana? 2. Apa kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dalam menangani kasus tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi dan bagaimana penanggulangan atas kendala-kendala tersebut?	Penelitian ini lebih mengfokuskan penerapan dari pasal 21 ayat(2) jo pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya terhadap tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
4	Wahyu Eka Purnama, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (2013)	Perumusan Unsur-Unsur Tindak Pidana Terhadap Satwa Langka Yang Dilindungi Dalam Putusan Pengadilan	1. Mengapa hakim dalam putusannya menerapkan Pasal 21 Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terkait tindak pidana terhadap satwa langka yang dilindungi tidak mencerminkan keadilan? 2. Bagaimana seharusnya hakim menerapkan pasal tindak pidana terhadap satwa langka yang dilindungi yang selaras dengan tujuan hukum?	Penelitian ini meneliti berkaitan dengan unsur-unsur yang terdapat dalam putusan pengadilan dengan menerapkan Pasal 21 dalam UU KSDAE terhadap putusan pengadilan yang tidak mencerminkan keadilan dan menyelaraskan dengan tujuan hukum.

B. Rumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, terdapat beberapa rumusan permasalahan mendasar berkaitan penanganan barang bukti satwa langka di Indonesia, antara lain:

1. Apakah pertimbangan hukum hakim terhadap pemusnahan barang bukti harimau sumatera dalam putusan pengadilan negeri no. 44/Pid.B/2016/PN.Agm dan putusan no. 702/Pid.sus/2015/PN.Jmb ?
2. Apakah pemusnahan barang bukti harimau sumatera sudah sesuai dengan prinsip kemanfaatan ?

C. Tujuan Penelitian

Berpangkal dari rumusan masalah tersebut, adapun tujuan penelitian ini, diantaranya:

1. Mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis pertimbangan hukum terhadap barang bukti harimau sumatra dalam tindak pidana pasal 21 undang-undang no.5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (Studi putusan pengadilan negeri No. 44/Pid.B/2016/PN.Agm dan putusan No. 702/Pid.sus/2015/PN.Jmb) dengan mempertimbangkan nilai kemanfaatan.
2. Mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis pemusnahan barang bukti harimau sumatera dalam tindak pidana sudah sesuai dengan prinsip kepastian hukum.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Gagasan penelitian ini diharapkan mampu memperkaya kajian keilmuan, memberikan kontribusi serta berguna bagi pengembangan hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum lingkungan untuk menegakkan hukum pidana dalam serta menciptakan masyarakat yang kritis, solutif dan inovatif, serta responsif terhadap lingkungan hidup.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Dalam penulisan ini diharapkan mampu menjadi bahan hukum bagi pemerintah dalam menganalisis dan mengevaluasi terhadap penanganan barang bukti atas hasil tindak kejahatan terhadap satwa langka dibentuk sebagai upaya penegakan.

b. Bagi Penegak Hukum dan Pemerhati Lingkungan Hidup

Penulisan ini diharapkan mampu memberikan saran dan masukan bagi penegak hukum dalam menangani barang bukti dalam bentuk satwa langka dan meningkatkan profesionalitas dan integritas serta akuntabilitas dalam penanganannya.

c. Bagi Mahasiswa

Penulisan ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan bahan bacaan dalam menganalisis dan mengimplementasikan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan berkaitan dengan isu lingkungan hidup yang erat kaitannya dengan hukum pidana di Indonesia.

d. Bagi Masyarakat

Penyusunan skripsi ini diharapkan mampu membekali dan memberikan informasi bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan serta pengawasan atas penanganan barang bukti dalam tindak kejahatan terhadap satwa langka sangat penting guna optimalisasi pengawasan, penyelenggaraan serta partisipasi publik dalam penanganan satwa langka.

E. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian memberikan gambaran yang jelas dan terarah mengenai permasalahan penanganan barang bukti atas hasil tindak kejahatan terhadap satwa langka. Berikut sistematika yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini meliputi: latar belakang permasalahan tentang dinamika pertimbangan hukum hakim terhadap pemusnahan barang bukti harimau sumatra dalam tindak pidana pasal 21 undang-undang no.5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (Studi putusan pengadilan negeri No. 44/Pid.B/2016/PN.Agm dan putusan No. 702/Pid.sus/2015/PN.Jmb), rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian teoritis dan praktis bagi pemerintah, mahasiswa, maupun masyarakat.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tinjauan pustaka, yakni bahan pustaka yang menjadi dasar acuan dalam menganalisis permasalahan. Tinjauan pustaka yang digunakan, antara lain: (1) Hukum dan Peradilan: Ciri Negara Hukum; (2)

Sistem Peradilan Pidana; (3) Pertimbangan Hukum; (4) Potret Hukum terhadap Satwa yang Dilindungi; serta (5) Penanganan Barang Bukti.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, terdiri dari: (1) jenis penelitian menggunakan yuridis normatif, (2) metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan kasus; (3) jenis bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder, meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier; (4) teknik penelusuran bahan hukum; (5) teknik analisis bahan hukum; dan (6) definisi konseptual.

BAB IV : PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi mengenai pembahasan tentang rumusan masalah yang ditentukan oleh penulis, meliputi: (1) pembahasan mengenai konflik hukum dalam peraturan perundang-undangan dan pertimbangan hukum yang digunakan dalam penanganan barang bukti atas hasil tindak kejahatan terhadap satwa langka; (2) penerapan prinsip kepastian hukum dalam penanganan barang bukti atas hasil tindak kejahatan terhadap satwa langka untuk ditangani sesuai hukum yang berlaku.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dari pembahasan yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum dan Peradilan: Ciri Negara Hukum

Pembicaraan tentang adanya kekuasaan kehakiman yang bebas tak dapat dilepaskan dari ide negara hukum. Sebab, gagasan tentang kemerdekaan yudikatif lahir bersamaan dengan gagasan negara demokrasi dan negara hukum menyusul pada abad pencerahan di dunia barat.⁵⁷

Istilah negara hukum berkaitan dengan paham *rechstaat* dan *the rule of law*, juga berkaitan dengan paham *nomocracy* yang berasal dari perkataan *nomos* dan *cratos*; *nomos* berarti norma sedangkan *cratos* adalah kekuasaan, ialah kekuasaan oleh norma atau kedaulatan hukum.⁵⁸ Jadi dalam kaitan dengan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara menurut paham nomokrasi kekuasaan tertinggi ada pada norma atau yang berdaulat adalah norma atau hukum (dalam hal ini kedaulatan hukum)

Unsur-unsur *rechstaat* dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl dari kalangan ahli hukum Eropa Barat Konstitusional sebagai berikut⁵⁹: (1) mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia; (2) untuk melindungi hak asasi tersebut maka penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada teori “Trias Politica”; dalam menjalankan tugasnya, pemerintah berdasar atas undang-undang (*wetmatig*

⁵⁷ Moh. Mahfud MD, **Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi**, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 88

⁵⁸ Jimly Asshiddiqie, **Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia**, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 151

⁵⁹ Anwar C. **Teori dan Hukum Konstitusi, Paradigma Kedaulatan dalam UUD NRI TAHUN 1945 (Pasca Perubahan) Implikasi dan Implementasi Pada Lembaga Negara**, Edisi Kedua, Intrans Publishing, Malang, 2011, hlm. 47

bertuut); (3) apabila dalam menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang pemerintah masih melanggar hak asasi (campur tangan pemerintah dalam urusan pribadi seseorang), maka ada pengadilan administrasi yang akan menyelesaikannya.

Dalam pada itu, AV Dicey dari kalangan ahli hukum Anglo Saxon memberikan pengertian *the rule of law* sebagai berikut⁶⁰: (1) supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum; (2) Kedudukan yang sama di depan hukum baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat; (3) terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan.

Perumusan cirri-ciri negara hukum yang dilakukan oleh Stahl dan Dicey kemudian ditinjau lagi sehingga dapat menggambarkan tugas pemerintah yang tidak boleh lagi bersifat pasif. “*International Comission of Jurists*” pada konferensinya di Bangkok pada tahun 1965 menekankan bahwa disamping hak-hak politik rakyat harus diakui pula adanya hak-hak sosial dan ekonomi. Komisi ini dalam konferensi tersebut juga merumuskan syarat-syarat (cirri-ciri) Pemerintahan yang demokratis di bawah *rule of law* (yang dinamis, baru) sebagai berikut⁶¹: (1) perlindungan konstitusional, artinya, selain menjamin hak-hak individu, konstitusi harus pula menentukan cara procedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin; (2) Badan Kehakiman yang bebas dan tidak memihak; (3) pemilihan umum yang bebas; (4) kebebasan menyatakan pendapat; (5) Kebebasan berserikat/ berorganisasi dan beroposisi; (6) pendidikan kewarganegaraan.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Anwar. C., Op.Cit., hlm. 49

Selanjutnya, Jimly Asshiddiqie merumuskan dua belas prinsip pokok yang harus dimiliki oleh suatu negara di zaman sekarang sebagai pilar penyangga berdiri tegaknya suatu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The Rule Of Law*, ataupun *Rechstaat*) dalam arti yang sebenarnya: (1) Supremasi hukum (*supremasi of law*); (2) Persamaan dalam hukum (*Equality before the law*); (3) Asas legalitas (*due process of law*); (4) pembatasan kekuasaan; (5) Organ-organ eksekutif independen; (6) Peradilan bebas dan tidak memihak; (7) Peradilan Tata Usaha Negara; (8) Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*); (9) Perlindungan Hak Asasi Manusia; (10) Bersifat Demokrasi (*Democratische Rechtsstaat*); (11) Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtsstaat*); (12) Transparansi dan kontrol sosial.⁶²

Menurut Moh. Mahfud MD, terdapat 10 prinsip yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan hukum nasional di Indonesia agar tercipta sebuah pemerintahan yang baik dalam bingkai Negara hukum dan pemerintahan demokratis, diantaranya⁶³:

- (1) Partisipasi, menjamin kerjasama dan partisipasi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi;
- (2) Penegakan Hukum, dilaksanakan secara konsekuen, konsisten, memperhatikan HAM termasuk pemberian insentif;
- (3) Transparansi, informasi yang terbuka bagi setiap pihak untuk setiap tahap pemerintahan;

⁶² Jimly Asshiddiqie, **Konstitusi....**, Op.Cit, hlm. 154-161

⁶³ Moh. Mahfud MD, **Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**, artikel, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2011, hlm. 3

- (4) Daya tanggap, respon yang tepat dan cepat terhadap permasalahan atau perubahan yang terjadi;
- (5) Kesetaraan, persamaan kedudukan bagi warga Negara tanpa diskriminasi;
- (6) Visi strategis, tersedianya kebijakan dan rencana yang terpadu serta jangka panjang;
- (7) Efisiensi dalam penggunaan sumber daya;
- (8) Profesionalisme, ketrampilan dan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik;
- (9) Akuntabilitas, bertanggungjawab kepada publik atas keputusan dan tindakan penyelenggara; serta
- (10) Pengawasan, tersedianya pengawasan yang efektif dengan keterlibatan masyarakat.

Hukum sesungguhnya dibuat dan ditegakkan untuk mewujudkan keadilan. Namun hukum dan keadilan memang tidak selalu sejalan. Hal itu terjadi karena keadilan sebagai nilai tidak mudah diwujudkan dalam norma hukum. Nilai keadilan yang bersifat abstrak dan tidak selalu bersifat rasional tidak dapat seluruhnya diwadahi dalam norma hukum yang preskriptif. Hukum dirumuskan secara umum untuk mewadahi variasi peristiwa hukum serta kemungkinan berkembang dimasa yang akan datang.⁶⁴

Keadilan yang coba dirumuskan dalam norma hukum tentu juga terbatas pada keadilan yang dipahami dan dirasakan oleh pembentuk hukum dan juga terbatas saat norma hukum itu dibentuk. Disisi lain, rasa keadilan masyarakat senantiasa

⁶⁴ Janedjri M. Gaffar, **Penegakan Hukum dan Keadilan**, Opini dalam Harian Seputar Indonesia, 28 Desember 2009

berkembang sejalan dengan perkembangan kondisi masyarakat itu sendiri. Hal itulah yang dapat menimbulkan praktik hukum kering dari keadilan atau bahkan penerapan hukum yang bertentangan dengan keadilan.⁶⁵

Selanjutnya Janedjri M. Gaffar berpendapat, sangat tepat rumusan Pasal 24 UUD NRI TAHUN 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hukum dan keadilan memang dapat menjadi dua substansi yang berbeda, tetapi harus dipahami dan ditegakkan sebagai satu kesatuan. Keadilan dalam hal ini bukan hanya keadilan hukum positif, tetapi juga meliputi nilai keadilan yang diyakini dan berkembang dalam masyarakat atau yang disebut sebagai keadilan substantif.⁶⁶

Menurut Rozenberg tidak salah ketika mengatakan: “kita semua merupakan bagian dari pencarian keadilan. Setiap orang berharap menyaksikan hakim berbuat sebagaimana mestinya dan berimbang, setiap orang berharap melihat pengadilan yang berhasil mencapai hasil yang benar, tetapi terlalu sering kita malah kecewa. Lebih mudah mencari keadilan daripada menemukan keadilan.”⁶⁷ Pada masa lalu pengadilan merupakan institusi sosial yang muncul secara lebih alami, yang diistilahkan sebagai “*Khadi Justice*” Seiring berkembangnya konsep hukum, maka model *Khadi Justice* digantikan oleh keadilan yang muncul dari pengadilan negara menghasilkan keadilan hukum (*legal justice* atau *formal justice*), yaitu keadilan berdasarkan hukum atau perundang-undangan,⁶⁸ keadilan berdasar

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ Janedjri M. Gaffar, Op.Cit.

⁶⁷ Dikutip dari buku, J. Djohansjah, Op.Cit., hlm.81

⁶⁸ J.Djohansjah, Op. Cit., hlm 85

moralitas (*moral justice*) dan keadilan berdasarkan keinginan masyarakat (*sosial justice*).⁶⁹

Pendapat bahwa lembaga peradilan sebagai pemberi keadilan, merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam diri seorang hakim. Oleh karena itu, bagaimana seorang hakim bertindak selalu dipersamakan dengan keadilan itu sendiri. Tatkala dipertanyakan mengenai masalah-masalah dalam sistem peradilan, maka jawaban paling umum adalah masalah hakim itu sendiri. Pengertian bahwa sistem peradilan sama dengan hakim itu sendiri jelas terlihat dalam Program-Program Pembangunan di Bidang Hukum-PROPENAS, dimana hampir semua program dikaitkan dengan profesi hakim dan fungsinya baik secara langsung maupun tidak langsung.⁷⁰

Setelah seorang hakim diangkat maka fungsinya dalam sistem peradilan mensyaratkan mereka untuk menarik diri dari campur tangan kehidupan sosial dan bisnis, termasuk segala hak yang berkenaan dengan masalah politik. Kewajiban mereka mengharuskan untuk menjadi terpercil atau menyisihkan diri. Mereka dilarang mencari publisitas atau popularitas. Hal ini karena latar belakang sosial dan gaya hidup seorang hakim tidak menjadi pertimbangan atas profesi hakim. Selain itu, karena ternyata lembaga peradilan tidaklah mencerminkan masyarakat atau bagian masyarakat itu sendiri. Tidaklah salah jika Alexander Hamilton berpendapat bahwa seorang hakim, tidak seperti pejabat negara lainnya dibidang eksekutif dan legislative, memegang jabatan dan profesinya “*during good behaviour*”.⁷¹

⁶⁹Dudu Duswara Maachmudin, **Mengembalikan Kewibawaan Mahkamah Agung sebagai Peradilan yang Agung**, E-Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 1, Maret 2013, hlm. 33-48

⁷⁰ *Ibid*, Op.Cit., hlm. 88

⁷¹ *Ibid*

B. Sistem Peradilan Pidana

Negara hukum dalam perlindungan terhadap satwa langka termasuk dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk menyediakan lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi yang harus dilindungi dan sekaligus sebagai wujud dari adanya perlakuan yang sama terhadap setiap warga negara dihadapan hukum. Apabila terjadi tindak pidana terhadap satwa langka harus dilakukan secara tepat untuk kemudian diajukan dalam sidang di depan pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam rangka menjadikan hukum untuk berfungsi mengayomi dalm arti menegakkan hukum itu sendiri, antara lain kehidupan yang demokratis; berkeadilan sosial dan berperikemanusiaan.

Negara, dalam hal ini negara hukum, bercirikan atas 4 (empat) hal, *pertama*, pemerintah semata-mata bertindak atas dasar hukum yang berlaku; *kedua*, masyarakat dapat mengajukan naik bandingdi pengadilan terhadap keputusan pemerintah dan pemerintah taat terhadap putusan pengadilan; *ketiga*, hukum sendiri adalah adil dan menjamin hak asasi manusia; serta *keempat*, kekuasaan kehakiman yang independen dari pengaruh.⁷²

Menurut Philipus M. Hadjon, perumusan syarat dasar dari negara hukum (*rechtstaat*), yaitu berlakunya Asas Legalitas; terdapat Pembagian Kekuasaan; adanya Jaminan Hak Dasar bagi rakyat; dan dilakukan pengawasan terhadap jalannya pengadilan.⁷³ Sementara apabila ditinjau dari konsepsi “*The Rule of Law*” maka suatu negara harus memiliki elemen yang menunjukkan adanya,

⁷² A. Mansyur Effendi, **Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 94

⁷³ Philipus M. Hadjon, **Ida Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia**, dalam Yurizal, *Op.Cit*, hlm. 31

supremacy of law, equality before the law dan constitution based on human right, dengan menunjukkan kesamaannya.⁷⁴ Dengan melihat unsur-unsur negara hukum (*rechtstaat*) konsep *Rule of Law* tersebut, sebagai bahwa perbandingan maka karakteristik negara Indonesia sebagai negara hukum memiliki unsur, sebagai berikut:

1. Hukum bersumber Pancasila;
2. Pemerintah berdasarkan sistem konstitusi;
3. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, terbebas dari pengaruh kekuasaan lain;
4. Setiap warga negara bersama dengan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum tanpa terkecuali;
5. Hukum berfungsi mengayomi dalam arti menegakkan kehidupan yang demokratis; berkeadilan sosial dan berperikemanusiaan.⁷⁵

Berbicara mengenai sistem hukum, sistem hukum positif Indonesia, yakni sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Pada dasarnya suatu sistem hukum adalah struktur hukum formal, di Indonesia, struktur formal kaidah hukum yang berlaku selaras dengan asasyang mendasarinya, yakni Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.⁷⁶ Salah satu subsistem dalam sistem hukum positif di Indonesia adalah peradilan.⁷⁷ Secara konstitusional dan yuridis formal telah ditetapkan sistem peradilan satu atap di Indonesia dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.⁷⁸

⁷⁴ Abdul Muktie Fadjar, **Peran The Rule of Law dalam Penguatan Civil Society**, dalam IDEA kumpulan Makalah “Konstitusi dan Demokrasi, IDEA, Jakarta 2001, hlm. 2

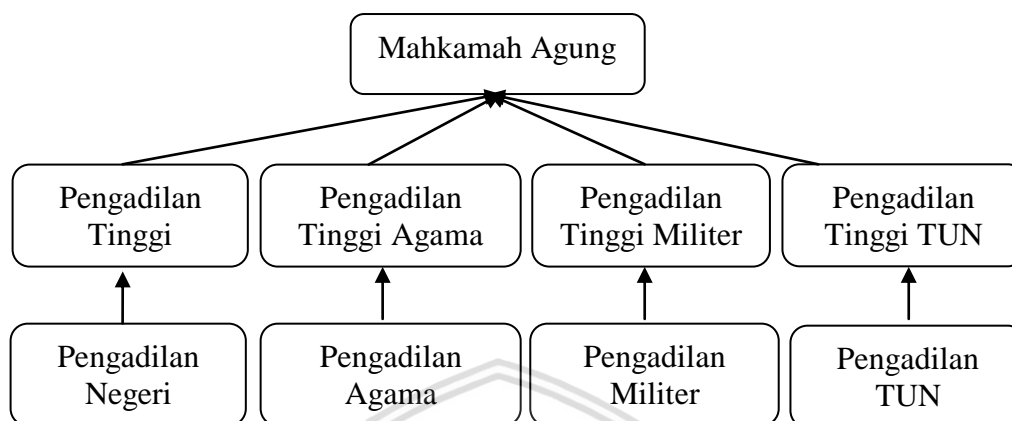
⁷⁵ Padmo Wahyono, **Kerangka Landasan Pembangunan Hukum**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2009, hlm. 21

⁷⁶ Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, **Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I**, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 121

⁷⁷ Tholib Effendi, **Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara**, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2013, hlm. 3

⁷⁸ Ahmad Mujahidin, Op.cit hlm. 7

Berikut merupakan bagan organisasi yudisial Indonesia, serta perubahan besar yang dihasilkan reformasi adalah Mahkamah Konstitusional baru dan terpisah.⁷⁹



Bagan.2.1 Organisasi Yudisial Indonesia saat ini

Berbicara tentang tindak pidana, pun termasuk dalam sistem peradilan pidana. Sistem tersebut merupakan subsistem dari sistem peradilan di Indonesia, juga termasuk dalam subsistem dari hukum positif di Indonesia. Oleh karena hal tersebut, adanya suatu hierarki sistem, dimana subsistem menunjukkan ciri berupa adanya interelasi antar satu dengan lainnya.

Dalam hukum pidana terdiri atas pembagian hukum pidana materiil dan formil.⁸⁰ Hukum pidana materiil yang dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maupun dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana dan tidak terkodifikasi dalam KUHP, sedangkan hukum pidana formil dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana⁸¹ (KUHP).

Dengan demikian, dalam hal penegakkan hukum setiap tindakannya harus setara dengan cita yang terkandung dengan semangat dan keluhuran tujuan negara

⁷⁹ Sebastian Pompe, **Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung**, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, Jakarta, cetakan pertama februari 2012, hlm. 268

⁸⁰ Tholib Effendi, **Peradilan Pidana...Op.Cit.**, hlm. 4

⁸¹ Lihat, Indonesia, **Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana**, UU Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209

hukum. Dalam hal ini, landasan filosofis Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), tiada lain adalah Pancasila, yang erat kaitannya dengan sila Ketuhanan dan Kemanusiaan.⁸² Dengan landasan sila Ketuhanan, KUHP mengakui setiap pejabat aparat penegak hukum maupun tersangka atau terdakwa, merupakan:

1. Kesamaan manusia yang dependen kepada Tuhan, yaitu makhluk yang bergantung pada kehendak Tuhan. Semua makhluk tanpa terkecuali adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.
2. Oleh karena semua manusia merupakan hasil ciptaan Tuhan dan tergantung kepada kehendak-Nya, bermakna bahwa:
 - a. Tidak ada perbedaan yang asasi diantara sesama;
 - b. Memiliki tugas sebagai manusia yang mengembangkan dan mempertahankan kodrat, harkat dan martabatnya sebagai manusia ciptaan Tuhan;
 - c. Setiap manusia memiliki hak kemanusiaan yang harus dilindungi tanpa kecuali;
 - d. Fungsi atau tugas yang diemban oleh setiap manusia, hanya semata-mata dalam ruang lingkup menunaikan “amanat” Tuhan Yang Maha Esa.

Suatu wujud keadilan berlandaskan Tuhan Yang Maha Esa memiliki dimensi pertanggungjawaban:

1. Terhadap hukum;
2. Terhadap diri dan hati nurani sendiri;
3. Terhadap masyarakat, nusa dan bangsa; serta
4. Dihadapan Tuhan Yang Maha Esa.

Keluhuran dan kesucian moral yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa inilah yang dituntut KUHP, agat pada diri dan perilaku setiap aparat penegak hukum, terpatri semangat kesucian moral dalam setiap tindakan penegakkan

⁸² Monang Siahaan, **Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana**, PT Grasindo, Jakarta, 2017, hlm. 47

hukum sehingga jarak antara keadilan yang hendak diwujudkan menjadi kenyataan, tidak jauh berbeda dengan keadilan hakiki oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam meletakkan landasan tolak ukur pada nilai konsep keadilan yang ingin diciptakan dan diwujudkan merupakan keadilan yang setara dengan acuan keadilan dan melihat keadilan sesuai dengan pandangan keadilan KUHAP, sebagai perwujudan keadilan yang relatif. Melihat cita penegakan hukum acara pidana itu berkaitan dengan sila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, tekanannya dititikberatkan pada cita “cara pelaksanaan” aparat penegak hukum terhadap setiap manusia yang berhadapan dengan aparat penegak hukum.

Landasan filosofis kemanusiaan yang dicita-citakan oleh KUHAP sesuai dengan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, diharapkan suatu penegakan hukum yang luhur dan berbudi, yang menempatkan kedudukan aparat penegak hukum sebagai pengendali hukum demi mempertahankan perlindungan ketertiban masyarakat pada suatu pihak dan yang berhak mempertahankan derajat martabatnya serta hukum dan aparat penegaknya harus melindungi hak kemanusiaannya. Baik tersangka maupun terdakwa, penanganan barang bukti sekalipun sebagai serangkaian objek pemeriksaan yang dapat diperoleh keterangan yang dibutuhkan didepan pengadilan.

Kedua landasan tersebut di atas, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab merupakan landasan cita dan motivasi penegakan hukum menurut KUHAP. Kesadaran dan penghayatan atas penegekan hukum tersebut, ditambah dengan keberanian moral seluruh rakyat

untuk mendukung dan melakukan kontrol sosial berupa pengawasan terhadap aparat penegak hukum.

C. Pertimbangan Hukum

Berdasarkan kegiatan hakim dalam proses peradilan, maka pengertian penemuan hukum lebih menunjukkan kepada serangkaian kegiatan hakim untuk menemukan peraturan hukum yang akan diterapkan terhadap peristiwa konkrit yang sudah dikonstatasi atau dinyatakan telah benar-benar terjadi, untuk kemudian dicarikan kualifikasi peristiwa konkrit menjadi peristiwa hukum. Setelah itu dijatuhkan putusan atas peristiwa konkrit yang dihadapkan kepadanya.

Penemuan hukum merupakan reaksi terhadap masalah yang dihadapkan kepadanya.⁸³ Reaksi ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana hakim menghadapi peristiwa konkrit yang diajukan kepadanya hingga sampai kepada putusan yang dibuatnya. Hal ini berkaitan dengan dua hal yang harus diketahui oleh penegak hukum dalam mengadili dan memutuskan perkara di pengadilan. Dua hal yang harus diketahui oleh hakim adalah peristiwa konkrit dan hukum yang akan diterapkan terhadap peristiwa konkritnya. Peristiwa konkrit yang menjadi sengketa diketahui melalui proses peradilan, sedangkan pengetahuan tentang hukum itu sudah seharusnya dimiliki oleh hakim sesuai dengan asas *ius curia novit*.⁸⁴

Kegiatan yang dilakukan hakim dalam penemuan hukum terdiri dari kegiatan mengkonstatasi atau menetapkan peristiwa konkrit sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi, kegiatan mengkualifikasi yaitu kegiatan menghubungkan peristiwa

⁸³ Pontier, J.A.,. **Penemuan Hukum** (Terj. Arief Sidharta) Jendela Mas Pustaka. Bandung, 2008, hlm. 6

⁸⁴ E. Nurhaini Butarbutar, **Antinomi Dalam Penerapan Asas Legalitas Dalam Proses Penemuan Hukum**, Jurnal Yustisia Vol.1 No.1 Januari – April 2012, hlm. 150

konkrit tersebut dengan sumber hukum sehingga diketahui peristiwa hukum apa yang telah dilakukan dan kegiatan mengkonstitusi yaitu kegiatan untuk memberi putusan. Jika dikaitkan dengan kegiatan yang dilakukan hakim dalam proses penemuan hukum, maka asas legalitas itu diterapkan ketika melakukan kegiatan mengkualifikasi peristiwa konkrit menjadi peristiwa hukum dengan cara menghubungkan peristiwa konkrit yang sudah dinyatakan terbukti dengan undang-undang yang menguasainya. Asas legalitas juga diterapkan ketika melakukan kegiatan mengkonsitusi atau kegiatan memberikan hukumnya yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku.

Asas legalitas merupakan akibat pengaruh pandangan positivisme, atau aliran legisme yang umumnya dianut oleh Negara-negara Eropa Kontinental atau pada negara yang mengenal sistem kodifikasi seperti Indonesia. Positivisme memandang undang-undang sebagai hukum yang lengkap dan jelas mengatur tentang suatu peristiwa. Akibatnya, pada negara yang menganut sistem kodifikasi ini, mengenal undang-undang sebagai sumber hukum yang utama. Dalam pandangan *positivisme*, tugas hakim pada dasarnya hanya menetapkan peristiwa konkritnya dan kemudian menerapkan undang-undang terhadap peristiwa konkritnya. Hakim dalam menyelesaikan suatu perkara, hanya menerapkan undang-undang pada faktanya atau peristiwa yang diajukan kepadanya karena berdasarkan gagasan tersebut hakim tidak lain hanya sebagai corong undang-undang (*la bouche de la loi*).

Pandangan bahwa hakim hanya sebagai corong undang-undang bertitik tolak pada anggapan, bahwa hakim dilarang untuk menilai undang-undang, karena sebelum membentuk undang-undang, pembentuk undang-undang telah mengamati

kenyataan kemasyarakatan secara cermat terlebih dahulu, sehingga hukum yang dikodifikasi itu sudah merupakan pencerminan dari hukum yang berlaku dalam masyarakat. Undang-undang sebagai satu-satunya sumber hukum, dianggap cukup jelas dan lengkap yang berisi semua jawaban terhadap semua persoalan hukum. Perkembangan masyarakat yang disebabkan aspek modernisasi dalam mobilitas sosial, urbanisasi, industrialisasi dan perubahan teknologi yang tidak dapat dihindari dapat menghasilkan membuat hukum tidak dapat mengikuti atau menuntaskan semua kepentingan manusia.

Demikian dalam perkara pidana yang sangat ketat menganut asas legalitas ini, akibat perkembangan perilaku kejahatan baru yang tidak diatur dalam KUHP menyebabkan pertumbuhan kejahatan baru, sehingga mau tidak mau harus dilakukan perluasan dan penyimpangan dari asas legalitas untuk memenuhi kebutuhan hukum pidana di luar kodifikasi.⁸⁵

Paham modern berpendapat bahwa hukum dan undang-undang sifatnya statis sedangkan masyarakat adalah dinamis sehingga hukum dan undang-undang sering ketinggalan dari perkembangan masyarakat (*het recht hinkt achter de feiten aan*) oleh karena itu, analogi itu dapat diterapkan untuk menjaga agar hukum pidana tidak tertinggal dengan perkembangan masyarakat. Namun karena analogi dilarang maka hakim mengambil keputusannya berdasarkan pada penafsiran ekstensif. Antara penalaran analogi dengan penafsiran ekstensif pada dasarnya mempunyai kemiripan satu sama lain, karena analogi sifatnya mempersamakan suatu peristiwa yang belum ada pengaturannya dengan peristiwa yang mirip dengan peristiwa yang sudah ada peraturannya. Penalaran analogi digunakan

⁸⁵ Lihat, Purnomo dalam E. Nurhaini Butarbutar, **Antinomi Dalam Penerapan Asas Legalitas**..., *Op.Cit.*, hlm. 151

apabila menghadapi peristiwa-peristiwa yang analog atau mirip, tidak hanya sekedar mirip juga apabila kepentingan masyarakat menuntut penilaian yang sama, dengan peristiwa yang ada peraturannya. Penafsiran ekstensif merupakan penafsiran atau menjelaskan suatu peristiwa yang belum diatur yang sifatnya memperluas yang melampaui batas yang diberikan oleh penafsiran gramatikal sehingga peraturan yang dijelaskan itu dapat diterapkan terhadap peristiwa yang sudah diatur oleh undang-undang. Problematik penerapan asas legalitas umumnya terdapat dalam perkara pidana karena berkaitan dengan kedudukan yang tidak seimbang antara tersangka/terdakwa dengan aparat hukum yang berkepentingan, sehingga dikuatirkan terjadi tindakan sewenangwenang dari aparat hukum.

Menurut Djokosutono,⁸⁶ salah satu perbedaan antara hukum pidana dengan hukum perdata dilihat dari kedudukan pihak yang berkepentingan, yaitu dalam hukum privat (perdata) mengatur hubungan yang kedudukannya sejajar, sedangkan hukum publik mengatur kedudukan yang tidak sederajat, yaitu antara pemerintah dengan pelaku tindak pidana.

Adanya asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 KUHP menyebabkan hukum pidana bersifat memaksa. Sifat memaksa dalam hukum pidana yang sudah mengatur sedemikian rupa mengenai batasan delik dan kaedah sanksi, membuat hakim pidana tidak dapat menciptakan delik baru maupun sanksi-sanksi baru di luar delik ataupun sanksi yang sudah ditentukan dalam KUHP. Sebagai asas, penerapan asas legalitas dalam sistem peradilan pidana harus tetap dijalankan meskipun di dalam penerapannya terdapat antinomi atau konflik dengan beberapa asas-asas umum hukum acara seperti asas *rechtsweigerig*, asas mengadili

⁸⁶ Lihat, Teguh Prasetyo, **Hukum Pidana Materiil**, Kurnia Kalam, Yogyakarta, 2005, hlm. 9

menurut hukum, dan asas kebebasan hakim dalam UU Kekuasaan Kehakiman. Hal ini berarti bahwa penerapan asas legalitas dalam KUHP tetap dapat eksis bersamasama.

Penerapan asas *rechtweigerig* yang terkandung dalam Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, didasarkan kepada perkembangan pemikiran atau gagasan bahwa semua materi hukum yang telah diatur secara tuntas dan menyeluruh di dalam undang-undang, tidak dapat dipertahankan lagi mengingat semakin berkembangnya kepentingan masyarakat, sehingga tidak mungkin dicakup dalam suatu undang-undang, sedangkan penerapan asas legalitas didasarkan kepada pemikiran bahwa semua materi hukum sudah diatur sedemikian rupa dalam undang-undang sehingga mencakup keseluruhan kepentingan manusia secara tuntas.

Antinomi antara asas legalitas dengan asas *rechtweigerig* terjadi ketika peristiwa konkrit yang diajukan kepada hakim, tidak diatur dalam perundang-undangan, ataupun tidak terdapat jawabannya dalam perundangundangan. Oleh karena itu dalam penerapannya, hakim harus melakukan penafsiran teleogis terhadap berlakunya kedua asas tersebut. Penerapan asas *rechtweigerig* bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum, sehingga tujuannya tercapai, yaitu ketertiban dalam masyarakat, sedangkan asas legalitas bertujuan untuk menghindari kesewenang-wenangan dari penguasa dan untuk menjamin kepastian hukum. Putusan hakim sebagai hasil akhir dari kegiatan penemuan hukum harus memenuhi unsur *Idee des Recht* yang dikemukakan Radbruch,⁸⁷ yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan

⁸⁷ Lihat, Radbruch dalam E. Nurhaini Butarbutar, **Antinomi Dalam Penerapan Asas Legalitas...**, *Op.Cit.*, hlm. 154

(*Gerechtigkeit*) secara proporsional. Dengan menerapkan asas legalitas dan asas *rechtweigerung* secara bersama-sama, maka putusan hakim tersebut telah memenuhi unsur kepastian hukum sekaligus unsur keadilan dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Jika dikaitkan dengan situasi undang-undangnya tidak jelas atau tidak dapat mencakup peristiwa konkrit yang dihadapkan kepadanya, maka berdasarkan asas *rechtweigerung* harus diterapkan dengan cara menjelaskan atau menafsirkan undang-undang sehingga dapat diterapkan terhadap peristiwanya. Penerapan asas *rechtweigerung* berkaitan dengan asas *ius curia novit*, yaitu asas yang menganggap hakim tahu semua hukum.

Asas *ius curia novit* mengharapkan hakim sebagai pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman, mempunyai pengetahuan hukum yang berlaku dalam masyarakat sehingga dapat mengadili dan memutuskan semua perkara yang dihadapkan kepadanya. Apabila hakim tidak menemukan hukum dalam undang-undang atau hukum tertulis, maka hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1) dengan Pasal 19 UU Kekuasaan Kehakiman).

Antinomi penerapan asas legalitas juga terjadi ketika dihadapkan dengan asas kebebasan hakim yang merupakan salah satu prinsip penting penyelenggaraan peradilan dalam suatu negara hukum. Asas legalitas mengharuskan hakim tunduk kepada undang-undang dalam melakukan penemuan hukum, sebaliknya asas kebebasan hakim menginginkan hakim bebas dan tidak terikat kepada pihak ekstra judisial.

D. Potret Hukum terhadap Satwa yang Dilindungi

Instrumen hukum internasional perlindungan dan pemanfaatan satwa liar yang dilindungi (wildlife spesies) antara lain adalah Daftar Merah Spesies yang Terancam Punah IUCN (“Daftar Merah IUCN”) dan CITES 1973. Indonesia meratifikasi CITES melalui Keputusan Presiden No. 43 tahun 1978, pada tanggal 15 Desember 1978.⁸⁸

Sesuai dengan tingkat populasi, kondisi habitat dan penyebarannya, IUCN mengklasifikasikan spesies berdasar tingkat keterancamannya terhadap kepunahan. Spesies-spesies yang terancam punah dimasukkan dalam Daftar Merah IUCN.⁸⁹ Kategori keterancaman spesies berdasarkan daftar merah IUCN adalah sebagai berikut:⁹⁰

1. Punah (*Extinct* (**EX**))

Suatu taxon dikatakan punah apabila tidak ada keraguan bahwa individu terakhir telah mati. Suatu taxon diduga punah apabila survei menyeluruh di habitat yang diketahui dalam waktu yang memadai (harian, musiman atau tahunan) di seluruh wilayah penyebarannya tidak dapat mencatat keberadaan individu;

2. Punah di alam (*Extinct In The Wild* (**EW**))

Suatu taxon dikatakan punah dialam apabila diketahui hanya hidup sebagai tanaman, di dalam kandang atau dikembangkan di alam di luar penyebaran aslinya;

⁸⁸ Indonesia, Keputusan Presiden Tentang Convention On International Trade In. Endangered Species Of Wild Fauna And Flora, Keppres No. 43 Tahun 1978, Lihat juga: Keppres No. 1 tahun 1987 tentang Ratifikasi Konvensi CITES

⁸⁹ Pokja Kebijakan Konservasi. **Draft Naskah Akademis revisi UU No.5 tahun 1990.** (Jakarta; Pokja Kebijakan Konservasi. 2014) hal. 24

⁹⁰ IUCN, The IUCN Red List of Threatened Species, Versi 2015-4 (*online*), <http://www.iucnredlist.org>, diunduh pada 11 Desember 2017.

3. Dalam Bahaya Kepunahan (*Endangered* (**EN**))

Suatu taxon dikatakan dalam bahaya kepunahan apabila memenuhi kriteria A sampai E untuk spesies dalam bahaya kepunahan sehingga dianggap menghadapi resiko yang sangat tinggi untuk terjadinya kepunahan di alam;

4. Rentan (*Vulnerable* (**VU**))

Suatu taxon dikatakan rentan apabila memenuhi kriteria A sampai E untuk spesies rentan sehingga dapat dianggap menghadapi resiko tinggi terhadap kepunahan di alam;

5. Mendekati terancam (*Near Threatened* (**NT**))

Suatu taxon dikatakan mendekati terancam apabila telah dievaluasi tetapi tidak memenuhi kriteria CR, EN atau VU, tetapi mendekati kriteria tersebut atau cenderung untuk memenuhi kriteria terancam pada butir 3, 4 dan 5.

6. Belum terancam/belum perlu diperhatikan (*Least Concern* (**LC**))

Taxon yang telah dievaluasi tetapi tidak memenuhi kriteria CR, EN, VU maupun NT. Spesies yang tersebar luas dan melimpah masuk dalam kategori ini; serta

7. Tidak Cukup (kekurangan) Data (*Data Deficient* (**DD**))

Taxon yang tidak memiliki informasi yang cukup untuk melakukan penilaian langsung maupun tidak langsung. Spesies yang masuk dalam kategori ini belum tentu dalam posisi yang aman dari ancaman kepunahan.

Sementara itu, CITES, atau Konvensi mengenai Pengendalian Perdagangan Spesies Hidupan Liar,⁹¹ mengategorikan spesies dalam 3 kelas yaitu spesies yang

⁹¹ United Nations General Assembly. "Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora". 1973

termasuk di dalam Appendix I, II dan III (Non-Appendix). Setiap kategori secara jelas dibedakan aturan-aturan kontrol perdagangannya sebagai berikut:⁹²

1. ***Spesies Appendix I*** (Kategori I): yaitu spesies-spesies yang terancam punah yang menurut IUCN termasuk dalam katagori genting (critically endangered/CR), sebagian rentan (vulnerable/VU) serta dalam bahaya kepunahan (endangered/EN) dan punah di alam (extinct in the wild);
2. ***Spesies Appendix II*** (Kategori II): yaitu spesies-spesies yang saat ini belum dalam keadaan terancam punah namun apabila pemanfaatannya tidak dikendalikan dengan ketat maka akan segera menjadi terancam punah. Kategori ini dapat mencakup kategori IUCN VU dan NT;
3. ***Spesies Non-Appendix*** (Kategori III): yaitu spesies-spesies yang populasinya melimpah, termasuk yang menurut IUCN masuk katagori Least Concerned (LC) dengan tingkat pemanfaatan yang cukup tinggi sehingga cukup dipantau pemanfaatannya.

Sementara, di tingkat nasional, perlindungan dan pengelolaan kawasan konservasi serta perlindungan dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, serta kawasan hutan serta berdasarkan fungsi pokok ke dalam 3 kategori yaitu: hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi.⁹³ Pada hutan konservasi hanya dapat dilakukan pemanfaatan kawasan hutan dengan batasan-batasan tertentu, disebutkan bahwa konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan:⁹⁴

- a. perlindungan sistem penyangga kehidupan;

⁹² *Ibid.*, hlm. 30

⁹³ Lihat, Indonesia, **Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kehutanan...***Op.Cit.*, pasal 6

⁹⁴ Lihat, Indonesia, **Undang-Undang tentang Konservasi...** *Op.Cit.*, pasal 5

- b. pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
- c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Prinsip dasar pengelolaan kawasan hutan konservasi yang membedakan dengan pengelolaan hutan lainnya terletak pada prinsip kehati-hatian untuk menghindari perubahan-perubahan terhadap kondisi aslinya. Prinsip kehati-hatian ini bertujuan mempertahankan daya dukung alam (*carrying capacity*) sebagai penyangga kehidupan dan menjaga kelangsungan potensi keanekaragaman hayati (*biodiversity*) sumber daya alam hayati (*natural capital stock*). Oleh karena itu, aturan dalam pengelolaan kawasan hutan konservasi lebih banyak menyebutkan pembatasan-pembatasan untuk menjaga habitat sedikit mungkin modifikasi.

Salah satu pilar penting dalam konservasi yang dilakukan oleh pemerintah adalah pengawetan keanekaragaman jenis satwa beserta ekosistemnya. Hal ini dilaksanakan dengan menjaga keutuhan kawasan suaka alam agar tetap dalam keadaan asli dan tidak punah. Kegiatan pengawetan jenis ini dapat dilakukan di dalam (*in-situ*) dan di luar (*ex-situ*) kawasan suaka alam atau kawasan konservasi.⁹⁵ Pengawetan di luar kawasan meliputi pengaturan mengenai pembatasan tindakan-tindakan yang dapat dilakukan terhadap tumbuhan dan satwa.⁹⁶

Kegiatan pengawetan jenis satwa di dalam kawasan suaka alam dilakukan dengan membiarkan agar populasi semua jenis satwa tetap seimbang menurut proses alami di habitatnya. Sedangkan di luar kawasan suaka alam dilakukan

⁹⁵ *Ibid.*, pasal 12 dan pasal 13

⁹⁶ *Ibid.*, penjelasan pasal 11

dengan menjaga dan mengembangbiakkan jenis tumbuhan dan satwa untuk menghindari bahaya kepunahan.

Dalam rangka melakukan upaya pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, pemerintah kemudian menggolongkan satwa dalam 2 jenis, yakni: satwa yang dilindungi dan satwa yang tidak dilindungi.⁹⁷ Satwa yang dilindungi kemudian digolongkan kembali menjadi: satwa dalam bahaya kepunahan dan satwa yang populasinya jarang.⁹⁸

Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa penggolongan jenis satwa yang dilindungi dimaksudkan untuk melindungi satwa agar tidak mengalami kepunahan.⁹⁹ Penetapan ini dapat diubah sewaktu-waktu oleh otoritas manajemen, tergantung dari tingkat keperluannya, yang ditentukan oleh tingkat bahaya kepunahan yang mengancam jenis bersangkutan.

E. Penanganan Barang Bukti

Berkaitan alat bukti,¹⁰⁰ disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel negatif wettelijk, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian.¹⁰¹ Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

⁹⁷ *Ibid.*, pasal 20

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ Lihat, Indonesia, **Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana...Op.Cit.**, pasal 184 ayat (1)

¹⁰¹ Martiman Prodjohamidjojo, **Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 19

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; serta
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan,

Atau dengan kata lain benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP dapat disebut sebagai barang bukti.¹⁰² Selain itu di dalam *Hetterziene in Landcsh Regerment* (HIR) juga terdapat perihal barang bukti. Dalam Pasal 42 HIR disebutkan bahwa para pegawai, pejabat atau pun orang-orang berwenang diharuskan mencari kejahatan dan pelanggaran kemudian selanjutnya mencari dan merampas barang-barang yang dipakai untuk melakukan suatu kejahatan serta barang-barang yang didapatkan dari sebuah kejahatan. Penjelasan Pasal 42 HIR menyebutkan barang-barang yang perlu di-beslag di antaranya:

- a. Barang-barang yang menjadi sasaran tindak pidana (*corpora delicti*)
- b. Barang-barang yang terjadi sebagai hasil dari tindak pidana (*corpora delicti*)
- c. Barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (*instrumenta delicti*)
- d. Barang-barang yang pada umumnya dapat dipergunakan untuk memberatkan atau meringankan kesalahan terdakwa (*corpora delicti*)

¹⁰² Ratna Nurul Afiah, **Barang Bukti Dalam Proses Pidana**, hal. 14

Selain dari pengertian-pengertian yang disebutkan oleh kitab undang-undang di atas, pengertian mengenai barang bukti juga dikemukakan dengan doktrin oleh beberapa Sarjana Hukum. Prof. Andi Hamzah mengatakan, barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik.¹⁰³

Ciri-ciri benda yang dapat menjadi barang bukti :

- a. Merupakan objek materiil;
- b. Berbicara untuk diri sendiri;
- c. Sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian lainnya; serta
- d. Harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa.

Barang bukti (*corpus delicti*) adalah barang bukti kejahatan. Dalam Pasal 181 KUHAP majelis hakim wajib memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenali barang bukti tersebut. Jika dianggap perlu, hakim sidang memperlihatkan barang bukti tersebut. Barang bukti ialah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti pengadilan. Menurut Monang Siahaan yang dapat disebut dengan barang bukti, antara lain:¹⁰⁴

- a. Barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - b. Barang yang dipergunakan untuk membantu melakukan suatu tindak pidana;
 - c. Benda yang menjadi tujuan dari dilakukannya suatu tindak pidana;
- serta

¹⁰³ Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, hal. 254

¹⁰⁴ Monang Siahaan, **Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana**, PT Grasindo, Jakarta, 2017, hlm. 36-37

- d. Benda yang dihasilkan dari suatu tindak pidana;
- e. Benda tersebut dapat memberikan suatu keterangan bagi penyelidikan tindak pidana tersebut, baik berupa gambar ataupun berupa rekaman suara; serta
- f. Barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana. Tetapi kehadiran suatu barang bukti tidak mutlak dalam suatu perkara pidana, karena ada beberapa tindak pidana yang dalam proses pembuktiannya tidak memerlukan barang bukti, seperti tindak pidana penghinaan secara lisan (Pasal 310 ayat (1) KUHP).

Bila memperhatikan keterangan di atas, tidak terlihat adanya hubungan antara barang bukti dengan alat bukti. Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa untuk menentukan pidana kepada terdakwa, kesalahannya harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah; dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Sehingga kualifikasi atas fungsi barang bukti dalam persidangan tindak pidana adalah, antara lain:¹⁰⁵

1. Memperkuat kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat [1] KUHAP);
2. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani;

¹⁰⁵ *Ibid.*

3. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan JPU.



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum dilakukan dengan tujuan mencari solusi dari suatu permasalahan atau isu hukum yang ada. Oleh karena itu, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari isu hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.¹⁰⁶

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah *yuridis normatif*,¹⁰⁷ yaitu penelitian difokuskan untuk mengkaji dan menganalisis terhadap beberapa bahan hukum yang berhubungan dengan penanganan terhadap barang bukti atas kejahatan terhadap satwa langka. Berdasarkan pada subyek dan jenis masalah yang ada, metode penelitian ini menggunakan *library method* (penelitian kepustakaan), atau yang disebut juga dengan *legal research* atau *legal research instruction*.¹⁰⁸ Namun demikian, penelitian kepustakaan tidak hanya bahan hukum di Indonesia terkait penanganan barang bukti atas kejahatan terhadap satwa langka, tetapi juga bahan dan aturan perundang-undangan dari

¹⁰⁶ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-Press, Jakarta, 2014, hlm. 43

¹⁰⁷ Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2012, hlm. 295

¹⁰⁸ *Library methode* merupakan salah satu dari grand method dalam penelitian hukum, dimana grand method memiliki tiga bagian, yakni *library research*, adalah karya ilmiah yang didasarkan pada literatur atau pustaka; *field research*, adalah penelitian yang didasarkan pada penelitian lapangan; dan *bibliographic research*, adalah penelitian yang memfokuskan pada gagasan yang terkandung dalam teori. Lihat, Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat**, Rajawali Press, Jakarta, 2006, hlm. 23

beberapa negara dan konvensi yang mengatur mengenai tindak kejahatan terhadap satwa langka.

B. Pendekatan Penelitian

Berhubungan dengan jenis penelitian yuridis normatif, maka dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan untuk meneliti peraturan perundang-undangan secara komprehensif dan sistematis tentang satwa yang dilindungi dan penanganan barang bukti atas kejahatan terhadap satwa yang dilindungi.¹⁰⁹ Selanjutnya, pendekatan kasus (*case approach*) digunakan bertujuan untuk memahami penerapan peraturan perundang-undangan yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus *wildlife crime* yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat (*incracht van gewijsde*) yang telah diputus sebagaimana dalam yurisprudensi terhadap penanganan barang bukti satwa yang dilindungi.¹¹⁰

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Untuk memahami permasalahan dalam penelitian ini, digunakan pengolahan data kualitatif. Pengolahan data yang digunakan adalah data sekunder, dimana data diperoleh melalui studi kepustakaan.¹¹¹

Bahan hukum yang digunakan, antara lain:

- a. Bahan Hukum Primer, yakni bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat,¹¹² meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

¹⁰⁹ Johnny Ibrahim, op.cit., hlm. 302-303

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ M. Syamsudin, **Operasionalisasi Penelitian Hukum**, RajaGrafindo, Jakarta, 2007, hlm. 98-99

¹¹² *Ibid.*, hlm. 96

- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, (Lembaran Negara Nomor 49 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Nomor 167 Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3803);
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3804); serta
- 7) Peraturan Menteri Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.26/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2017 tentang Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Nomor 642);
- 8) Putusan pengadilan, antara lain: (i) 24/Pid.B/2014/PN.Lbs; (ii) 25/Pid.B/2014/PN.Lbs; serta (iii) 702/PID.Sus/2015/PN.Jmb.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.¹¹³ Bahan hukum sekunder ini, meliputi literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dan berasal dari buku, surat kabar, pendapat ahli dari segi kepustakaan, skripsi, jurnal, tesis, desertasi, makalah, artikel dan majalah yang bersumber dari internet.
- c. Bahan Hukum Tersier, bahan penunjang yang bertujuan menjelaskan bahan hukum primer maupun sekunder, yang terdiri dari kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, dan berbagai kamus lainnya yang dibutuhkan.

D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi dan kajian pustaka (*library research*) serta dari internet. Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan, maka penulis melakukan penelusuran bahan hukum di Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Perpustakaan Umum Kota Malang, serta koleksi buku dan literatur pribadi.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, bahan hukum terkumpul direduksi dan dianalisis dengan teknik analisis deskriptif preskriptif, yakni suatu metode analisis bahan hukum untuk menentukan makna atau isi dalam aturan hukum dengan maksud untuk menguraikan dan memperkuat teori yang digunakan dan memberikan solusi terhadap isu hukum yang diteliti.¹¹⁴ Hal ini bertujuan untuk mendapatkan solusi

¹¹³ *Ibid.*, hlm. 96

¹¹⁴ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm. 9-10

yang tepat, dalam menemukan penanganan barang bukti atas kejahatan terhadap satwa langka, penulis menggunakan metode analisis yang integratif dan secara konseptual digunakan untuk mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikan dan relevansi terhadap isu hukum yang diteliti.

Dalam menginterpretasikan isi dan kandungan terhadap asas dan pasal yang relevan, penulis menggunakan metode otentik, gramatikal, serta teleologis.¹¹⁵

Tahapan analisis bahan hukum dalam penulisan ini, yakni:

1. Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Hakim

Pada tahap ini penulis mengidentifikasi norma yang berkaitan dengan pokok permasalahan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Dalam mengidentifikasi norma hukum, terdapat tiga konsepsi yang perlu diperhatikan, Pertama, konsepsi legal positivis yang dibentuk dan diundangkan oleh lembaga negara berwenang. Kedua, lebih menekankan pada penerapan norma hukum. Ketiga, hukum yang diperoleh dari suatu putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum mengikat.¹¹⁶

2. Analisis Kepastian Hukum dalam Penanganan Barang Bukti Atas Kejahatan Terhadap Satwa yang Dilindungi

Dalam tahapan akhir penulisan, penulis menggunakan pendekatan konsep dan perbandingan untuk menemukan konsep penanganan barang bukti atas kejahatan terhadap satwa langka. Selanjutnya penulis akan menguraikan konsep penanganan barang bukti atas kejahatan terhadap satwa langka perundang-undangan dan putusan pengadilan. Setelah

¹¹⁵ Sudikno Mertokusumo, **Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar**, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 57

¹¹⁶ M. Syamsudin, op.cit., hlm. 36

melakukan hal tersebut, dalam gagasan konsep penanganan barang bukti yang ditawarkan, penulis akan mengumpulkan kelemahan dalam konsep penanganan barang bukti atas kejahatan terhadap satwa yang dilindungi. Sehingga akan diketahui konsep penanganan barang bukti tersebut yang berlaku namun masih belum maksimal tepat.

F. Definisi Konseptual

1. Penanganan Barang Bukti

Penanganan barang bukti adalah barang-barang yang kuat diduga kepemilikan tersangka atau terdakwa yang diperoleh karena kejahatan atau yang sengaja digunakan bahkan hasil dari suatu tindakan kejahatan. Benda atau barang yang dapat dilakukan penyitaan sebagai barang bukti menurut undang-undang (KUHP) hanyalah benda yang memiliki keterkaitan dengan suatu tindak pidana.¹¹⁷

2. Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan pemerintah yang berkuasa bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.¹¹⁸

3. Kepastian Hukum

Baik dalam hukum pidana maupun hukum acara pidana, aturan tertulis tersebut disusun, dibentuk dan diundangkan untuk diberlakukan. Hukum acara pidana yang wujudnya terdiri dari susunan kalimat tertulis setelah

¹¹⁷ M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I**, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988, hlm. 297

¹¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, dalam Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 7

diundangkan untuk diberlakukan pada kehidupan nyata di dalam masyarakat menjadi hukum positif, dan akan menjadi efektif dan dirasakan guna mencapai keadilan dan kepastian hukum apabila penerapannya sesuai dengan yang dimaksud sebagai kesepakatan umum.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan hukum terhadap pemusnahan barang bukti Harimau Sumatera dalam putusan Pengadilan Negeri no. 44/Pid.B/2016/PN.Agm dan putusan no. 702/PID.Sus/2015/PN.Jmb

Pada hakikatnya, kekuasaan kehakiman merupakan salah satu unsur paling fundamental dalam struktur ketatanegaraan yang menjadi bagian dari sistem hukum suatu negara. Dalam konsep suatu negara hukum, termasuk pula konsep *rechtstaat*, maupun *the rule of law*, kekuasaan kehakiman menjadi tiang penyangga atau pilar dan unsur penting dalam bekerjanya sistem negara hukum tersebut, tidak terkecuali di Indonesia. Pun kekuasaan kehakiman dituntut harus bebas dan merdeka dari segala bentuk pengaruh siapapun. Menurut Paulus Efendi Lotulung, dalam menjatuhkan suatu putusan, hakim tidak dapat melakukannya dengan semaunya sendiri.¹¹⁹ Makna atas kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas itu mengandung unsur bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan dalam rambu-rambu yang harus dipedomani.

Lebih lanjut, Paulus Efendi Lotulung menyebut bahwa dalam era globalisasi, menjadi kewajiban kita semua yang bergerak di pemerintahan dan penegakan hukum untuk mengkaji secara serius dan mendalam mengenai “*judiciary accountability*” sebagai pasangan dari “*independency of judiciary*”. Bentuk tanggung jawab hakim atas putusan pengadilan ada dan bisa dalam mekanisme

¹¹⁹ Dahlan Sinaga, **Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila**, NusaMedia, Bandung, 2015, hal. 20

yang berbagai macam, dan salah satu yang perlu didasari dengan “*social accountability*” (pertanggungjawaban kepada masyarakat), karena pada dasarnya tugas kehakiman adalah melaksanakan *public service* di bidang akses keadilan bagi masyarakat pencari keadilan, pun bagi sumber daya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Secara teoritis, disamping sosial atau *public accountability* tersebut dikenal pula *political/legal accountability of state*, dan *personal accountability of the judge*.¹²⁰

Sekalipun sebagai ukuran pengenaan pidana, pada hakikatnya adalah penentuan hakim yang merdeka untuk menempatkan kesalahan sebagai batas-batas pengenaan pidana. Dalam hal ini, kesalahan subyek hukum atau pelaku pidana merupakan batas yang dapat diukur yang paling menentukan bagi hakim yang merdeka dalam memutuskan bentuk dan lamanya pidana yang tepat bagi seorang pelaku tindak pidana. Sekalipun tidak diragukan lagi kesalahan yang menentukan ukuran pemidanaan, akan tetapi kesalahan yang menentukan ukuran pemidanaan, hanya dapat dilaksanakan dengan limitasi berdasar hukum yang berlaku.

Di sisi lain, pemidanaan tidak hanya dijatuhkan hanya berdasarkan hukum. Dengan demikian, batas pemidanaan yang pertama ditentukan dengan model prumusan ancaman peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus tertentu, dalam hal ini peraturan yang berlaku untuk melindungi satwa yang dilindungi. Dalam tradisi *common law system*, batas yang demikian ini ditentukan oleh *precedent*, berdasarkan doktrin *stare decises*, kemudian berdasarkan peraturan perundang-undangan (*statute law*). Konsepsi tersebut berhubungan

¹²⁰ Paulus Efendi Lotulung, **Kebebasan Hakim Dalam Sistem Penegakan Hukum**, Makalah disampaikan dalam Seminar Hukum Nasional VIII yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional di Denpasar pada 14-18 Juli 2003, hal. 6-7

dengan asas legalitas, tidak hanya “*nullum crima sine lege*”, namun juga “*nulla poena sine lege*”, yang berarti bukan hanya mengenai pelarangan atas suatu perbuatan tetapi bentuk dan jumlah pengenaan pidana yang diancamkan terhadap pembuatnya pun harus ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu, bentuk dan lamanya pidana yang dapat dikenakan, terbatas hanya yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Konsekuensi hukum atas hal tersebut, adalah penentuan bentuk dan lamanya pemidanaan di luar dari undang-undang yang telah ditentukan, melanggar asas legalitas. Dalam hal fungsi kesalahan dalam menentukan dipidannay pembuat dibatasi oleh asas legalitas. Dengan demikian, bekerjanya asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan karenanya dibatasi oleh bekerjanya asas legalitas. Hal ini juga sebagai bagian dari konsekuensi dianutnya pemisahan tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana.

Sekalipun dalam peraturan perundang-undangan telah menentukan batas luar penjatuhan pidana, dalam penerapannya masih membutuhkan unsur kesalahan. Sedikitnya terdapat tiga hal yang berkaitan dengan hal tersebut, antara lain: (i) ketentuan hukum yang mengancam pembuat suatu tindak pidana dengan beberapa bentuk pidana, dalam hal ini bentuk pidana yang lebih berat diancamkan secara alternatif dan/atau kumulatif dengan bentuk pidana yang lebih ringan, (ii) ketentuan dalam hal batas minimum dan/atau maksimum dari tindak pidana tersebut, hakim dalam menentukan putusan atas pemidanaan dari minimum umum atau khusus (jika ditentukan tersendiri), sampai dengan maksimum khusus dan minimum (jika terjadi pemberatan tindak pidana). Penerapan tersebut terutama bergantung pada kesalahan pembuat.

Di samping itu, dianutnya *double track system* pemidanaan,¹²¹ yang memungkinkan selain pidana terhadap pembuat dapat pula padanya hanya dijatuhkan tindakan (*maatregel*), juga memiliki pengaruh. Hal ini menyebabkan undang-undang juga memberi batas pengenaan pidana poin ketiga, yakni pidana dialternatifkan dengan tindakan, dimana lebih tepat batas pengenaan tindakan daripada pengenaan pidana.

1. Gambaran Umum Pemusnahan terhadap Barang Bukti Harimau Sumatera dalam Putusan Pengadilan

Selanjutnya inti persoalan dalam meninjau hubungan kesalahan dan pemidanaan, yakni hal tersebut wajib dilakukan secara proporsional atas pasangan asas legalitas (tindak pidana) dan asas tiada pertanggungjawaban pidana. Di pandang bahwa proporsionalitas ini penting sebagai asas hukum yang menentukan pengenaan pidana dan pemidanaan, ditambah sebagai dasar dan asas pembatas pengenaan pidana.

Adanya unsur kesalahan menjadi pembatas umum pengenaan pidana. Unsur kesalahan tersebut menentukan apakah suatu tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku. Artinya kesalahanlah yang membedakan antara pelaku yang patut dipidana. Asas pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan dalam hal ini dapat dipidananya pelaku yang melakukan tindak pidana dengan unsur kesalahan.

Disparitas pidana memiliki pengaruh untuk memperlambat terhadap pencapaian tujuan pemidanaan. Menurut Harkristuti, disparitas pidana ini sebenarnya sah-sah saja, karena hukum sendiri telah memberikan

¹²¹ M. Sholehudin, **Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana**, Disertasi, 2003, Universitas Diponegoro, Semarang.

kewenangan mengambil keputusan yang luar biasa kepada hakim.¹²² Namun demikian, memperhatikan kepentingan atas korban tindak pidana tersebut sebaiknya hakim dengan sungguh-sungguh menjadikan kesalahan sebagai batas pengenaan pidana, sehingga disparitas tersebut dapat terelakkan.

Penentuan atas kemungkinan bentuk pidana merupakan pilihan atas berat ringannya pidana yang dijatuhkan, serta ditentukan oleh bagaimana pelaku pidana tersebut yang dipandang oleh hakim didasarkan pada unsur kesalahannya. Oleh karena itu, jika suatu tindak pidana diancam dengan model perumusan pidana yang alternatif-kumulatif, maka batas atasnya adalah kumulasi atas unsur pidana tersebut, sedangkan batas bawahnya adalah jika hanya satu bentuk pidana yang dijatuhkan. Artinya, hakim memilih menggunakan ketentuan hukum yang memungkinkan menggunakan sistem alternatif. Selain itu, dalam hal suatu tindak pidana diancam dengan pidana secara alternatif, maka bentuk pidana yang paling berat adalah batas atas, sedangkan batas bawah adalah bentuk pidana yang paling ringan.

Berikut ringkasan atas beberapa putusan pengadilan negeri yang telah memiliki kedudukan hukum tetap serta yang berkaitan dengan penanganan barang bukti terhadap satwa yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan berupa Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) beserta bagian-bagiannya.

¹²² Harkristuti Harkrisnowo, **Rekonstruksi Konsep Pidanaan: Suatu Gugatan Proses Legislasi Dan Pidanaan Di Indonesia**, dalam Dahlan Sinaga, ... *Op.Cit.*, hlm. 153

1. 44/Pid.B/2016/PN.Agm		
Surat Dakwaan	Kumulatif Alternatif	<p>Kesatu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - telah melakukan atau turut serta melakukan menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup - Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. <p>Kedua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - telah melakukan atau turut serta melakukan menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati <p style="text-align: center;">ATAU</p> <ul style="list-style-type: none"> - telah melakukan atau turut serta melakukann memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia, - Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.
Dasar Pertimbangan Hakim	<p>Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, dengan unsur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap orang; 2. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh 	

	<p>atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;</p> <p>3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;</p> <p>Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi,</p> <p>Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi; maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;</p>
Barang Bukti	<p>Menetapkan Barang Bukti berupa::</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) lembar kulit harimau sumatera yang telah di-offset beserta tulang belulanganya; <p>DIMUSNAHKAN</p>
Amar Putusan	<p>Memperhatikan, Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;</p> <p>MENGADILI</p> <p>terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menangkap dan membunuh satwa</p>

	<p>yang menangkap dan membunuh satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup serta Memporniagakan kulit dan bagian-bagian lain satwa yang dilindungi sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua;</p> <p>Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) lembar kulit harimau sumatera yang telah di-offset beserta tulang belulanganya; <p>DIMUSNAHKAN</p>
--	--

2. 702/PID.Sus/2015/PN.Jmb		
Surat Dakwaan	Alternatif	<p>Pertama:</p> <ul style="list-style-type: none"> - menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memorniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati - Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 ayat (2) huruf b UU RI No.5 Tahun 1990 Jo.pasal 40 ayat (2) UU RI No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; <p>Kedua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - memorniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau diluar Indonesia - Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 ayat (2) huruf d UURI No.5 Tahun 1990 Jo.pasal 40 ayat (2) UU RI No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Dasar Pertimbangan Hakim	<p>Pasal 21 ayat (2) huruf d UU No.5 Tahun 1990 Jo pasal 40 ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistimnya Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unsur Setiap Orang . 2.Unsur “memporniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. 3.Unsur “selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” 	
Barang Bukti	<p>Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) buah offset satwa harimau Sumatra. <p>karena ternyata merupakan offset harimau sumatra yang merupakan satwa yang harus dilindungi maka sudah selayaknya terhadap barang bukti tersebut diatas dirampas untuk Negara melalui Balai Konservasi Sumber daya Alam Jambi;</p>	
Amar Putusan	<p>Mengingat, memperhentikan Pasal 21 ayat (2) huruf d Jo pasal 40 ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistimnya Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;</p> <p style="text-align: center;">MENGADILI:</p> <p>telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Secara bersama-sama tanpa hak memorniagakan, menyimpan atau memiliki kulit satwa yang dilindungi ;</p> <p>Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) buah Offset satwa harimau Sumatra <p>Dirampas untuk Negara melalui Kantor BKSDA Propinsi Jambi ;</p>	

2. Dasar Hukum Pemusnahan Barang Bukti Harimau Sumatera

Model pengancaman pidana yang bersifat kumulatif lebih berat daripada model pengancaman yang bersifat alternatif. Adanya alternatif pidana justru membatasi pembedaan untuk bergerak ke bawah dan bukan ke atas, artinya, kesalahan pelaku akan membimbing hakim dalam menentukan bentuk pidana yang tepat, sedangkan bentuk pidana yang paling berat adalah wujud pengimbangan yang paling berat juga. Ringannya tingkat kesalahan pelaku menyebabkan hakim, baik secara logika maupun secara moral akan memilih alternatif bentuk pidana yang paling ringan.

Penjatuhan pidana secara kumulatif, padahal apa yang diancamkan adalah pidana alternatif, merupakan pengenaan pidana yang melewati batas kesalahan. Adanya ketentuan hukum yang mengizinkan hakim berbuat demikian, asalkan demi pencapaian tujuan pembedaan, hanya menyebabkan hal itu tidak bertentangan dengan asas legalitas, dalam arti *nulla poena sine lege*. Menurut Dahlan Sinaga, pidana secara kumulatif padahal ancamannya alternatif, bertentangan dengan asas legalitas, serta tindakan tersebut tidak memiliki dasar yang mengesankan.¹²³

Tingkat keseriusan atas suatu tindak pidana sebagai batas pembedaan, sangat penting, jika *precedent* yang ada sudah dianggap tidak lagi relevan. Mengingat umumnya berat ringannya pidana diserahkan sepenuhnya kepada subjektivitas hakim. Jika diyakini kesalahan sebagai batas pengenaan pidana yang proporsional, maka tingkat keseriusan tindak

¹²³ Dahlan Sinaga, ... Op.Cit., hlm. 155

pidana telah tercakup didalamnya. Hal ini selaras dengan pendapat Harkristuti,¹²⁴ bahwa “belum ada parameter yang digunakan untuk menetapkan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan sehingga kecenderungan untuk timbul *legislative disparity* sangat besar.”

Pemidanaan hanya dapat dilakukan ketika seseorang melakukan kesalahan yang ditandai oleh adanya kesalahan atau kealpaan pada pelakunya, sehingga menjadikan bentuk tersebut menjadi pembatas dalam penjatuhan pidana. Pemidanaan pub dibatasi oleh adanya kesalahan yang dilakukan pelakunya. Dengan kata lain, sebaiknya pemidanaan terhadap orang melakukan tindak pidana dengan sengaja lebih berat daripada mereka yang melakukannya karena kealpaan. Oleh karena itu, pemahaman hakim tentang corak dari suatu bentuk kesalahan sangat diperlukan dalam menjatuhkan pidana dengan tepat dan memiliki nilai keadilan yang bermartabat.

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, termasuk tingkat endemisme yang tinggi. Tingkat endemisme yang tinggi yang dilengkapi dengan keunikan tersendiri membuat Indonesia memiliki peran yang penting dalam perdagangan flora dan fauna di dunia, sehingga Indonesia menjadi salah satu pemasok terbesar perdagangan fauna dan flora dunia. Hal ini tentu saja merupakan peluang yang besar bagi Indonesia untuk dapat memanfaatkan kekayaan tumbuhan dan satwanya untuk meningkatkan pendapatan ekonomi, termasuk bagi masyarakat yang tinggal di sekitar

¹²⁴ Harkristuti Harkrisnowo, **Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Proses Legislasi Dan Pemidanaan Di Indonesia**, dalam Dahlan Sinaga, ... *Op.Cit.*, hlm. 156

habitat satwa. Namun, pemanfaatan ini memang harus betul-betul memperhatikan kondisi populasi berbagai jenis tumbuhan dan satwa yang dimanfaatkan agar dapat diperoleh pemanfaatan secara berkelanjutan.¹²⁵

Berdasarkan keinginan untuk memanfaatkan tumbuhan dan satwa secara berkelanjutan, Indonesia telah turut meratifikasi CITES (Convention on International Trade in Endangered of Wild Flora and Fauna) melalui Keppres No. 43 tahun 1978. Harus diakui bahwa walaupun sudah diratifikasi dalam waktu yang cukup lama, tetapi peraturan CITES belum dapat diimplementasikan secara optimal untuk mendukung perdagangan tumbuhan dan satwa yang berkesinambungan. Peraturan CITES mulai dari keharusan memiliki peraturan di tingkat nasional, penentuan kuota, mekanisme kontrol pengambilan tumbuhan dan satwa di alam hingga pengawasan lalu lintas perdagangannya masih belum terlaksana dengan baik. Indonesia pernah memperoleh ancaman 'total trade ban' dari sekretariat CITES karena dianggap tidak cukup memiliki peraturan nasional yang memadai yang dapat dipergunakan untuk mendukung implementasi CITES. Disisi lain, ternyata pemahaman dari seluruh pemangku pihak (stake holders) tentang CITES serta manfaatnya masih belum utuh sehingga seringkali menimbulkan salah pengertian yang tentu saja tidak kondusif untuk mendukung implementasi CITES.

Namun harus di akui bahwa, implementasi CITES di Indonesia memperlihatkan peningkatan yang signifikan, khususnya dalam hal peningkatan pelibatan pemangku pihak, termasuk Lembaga Swadaya

¹²⁵ Budi Riyanto. 2004. *Dinamika Kebijakan Konservasi Hayati di Indonesia*. Bogor: Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan. Hlm 5

Masyarakat (LSM) dalam isu mengenai CITES. Bahkan pihak LSM telah memperoleh pengakuan yang memadai dari Otoritas Ilmiah (Scientific Authority) maupun Otoritas Pengelola (Management Authority) untuk berperan serta dalam pelaksanaan CITES sesuai dengan kapasitas dan fungsi yang dimiliki. Dalam dua pelaksanaan COP CITES terakhir, pihak pemerintah secara terbuka mendiskusikan posisi dengan seluruh pemangku pihak, untuk memperoleh masukan yang memadai untuk dijadikan dasar bagi penentuan posisi pemerintah Indonesia.¹²⁶

Belum selesai dengan permasalahan implementasi CITES di Indonesia, ternyata terdapat permasalahan yang cukup krusial di Indonesia. Bahwa upaya perlindungan terhadap satwa liar telah diupayakan di Indonesia, akan tetapi muncul permasalahan hukum baru terhadap satwa yang diperdagangkan di dalam negeri. Pada kenyataannya Indonesia merupakan negara yang memiliki keaneka ragaman hayati dan menjadi pemasok perdagangan satwa liar. Masalah muncul ketika satwa liar yang tidak termasuk dilindungi menurut Hukum Indonesia diperjual belikan di Indonesia.¹²⁷

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya melarang perdagangan satwa. Kendala utama dalam pemberantasan perdagangan satwa yakni spesies yang bukan berasal dari Indonesia diperdagangkan di wilayah Indonesia yang mana masuk dalam daftar CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) yang telah

¹²⁶ Charles Victor Barber dkk, Meluruskan Arah Pelestarian keanekaragaman hayati dan pembangunan Indonesia. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 1997), hlm 32

¹²⁷ *Ibid* hlm. 129

diratifikasi oleh Indonesia dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987. Oleh Karena itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan spesies perlu disesuaikan dengan daftar satwa yang ditetapkan CITES dengan memperbarui yang dilindungi dan pertimbangan untuk mengelompokkan spesies kedalam tiga status perlindungan: (1) spesies dilindungi, yang mencakup spesies yang hampir punah dan terancam punah dan semua spesies di Lampiran I CITES; (2) spesies yang dikontrol ketat, yang mencakup spesies yang rentan terhadap perdagangan dan spesies di Lampiran II CITES; dan (3) spesies yang perdagangannya harus dipantau.¹²⁸

Secara umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dimaksudkan untuk menjaga kelestarian Sumber daya alam hayati agar tercapainya keseimbangan dan perlindungan terhadap lingkungan. Secara khusus peraturan yang menjelaskan tentang jenis satwa yang dilindungi dan wajib dilestarikan oleh Pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa. Sehingga, tidak diaturnya mengenai satwa luar yang diperjualbelikan di dalam wilayah Indonesia memunculkan tidak adanya pengaturan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Padahal seharusnya

¹²⁸ Tonny Soehartono dan Ani Mardiasuti, Pelaksanaan Konvensi CITES di Indonesia (Jakarta: Japan International Cooperation Agency, 2003), h. 9

satwa-satwa langka dilindungi dan di sesuaikan dengan Undang-Undang.¹²⁹

Peredaran ilegal satwa liar yang dilindungi adalah kegiatan yang merupakan ancaman terhadap kelangsungan hidup satwa. Peredaran ilegal ini berupa perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap satwa antara lain, dengan sengaja menangkap, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup¹³⁰. Hal ini ditegaskan pada Undang Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya pada Pasal 21 ayat (2) yang menyebutkan mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang dan Pasal 40 mengenai ketentuan pidananya.

Peraturan perundangan yang mengatur sanksi hukum untuk pelaku tindak pidana terhadap satwa liar dilindungi adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Namun pengaturan tentang satwa liar dilindungi yang termaktub di dalamnya adalah dari jenis endemik, sedangkan satwa liar dilindungi dari jenis non-endemik belum diatur secara jelas. Satwa liar menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya adalah semua binatang yang hidup di darat dan/atau di air dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat- sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Satwa liar dibedakan menjadi 2 kategori yaitu satwa liar dilindungi dan satwa liar tidak dilindungi. Perlindungan terhadap satwa

¹²⁹ *Ibid* hlm. 11

¹³⁰ Leden Marpaung, 1995, Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan dan satwa, Penerbit Erlangga, Jakarta., hlm. 55.

umumnya ditujukan terhadap satwa yang cenderung punah atau mengalami kelangkaan di habitat aslinya.

Secara internasional CITES mewajibkan negara anggota untuk dapat memberikan sanksi hukum yang berkaitan dengan jenis-jenis yang termasuk dalam appendiks CITES, selain itu tidak ada sanksi hukum terhadap pelanggaran CITES bagi jenis-jenis yang berasal dari luar Indonesia. Akibat dari hal tersebut di atas, satwa liar dilindungi non-endemik di Indonesia dapat dimiliki oleh orang tanpa dapat dikenakan sanksi hukum. Sedangkan CITES mewajibkan “para Pihak”, termasuk Indonesia sebagai anggota, untuk membuat regulasi yang mengatur perdagangan satwa liar baik ekspor maupun impor guna mencegah satwa liar tersebut dari bahaya kepunahan.

Pertanggungjawaban pidana, terutama ditujukan terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana dengan sengaja. Hal tersebut menyiratkan pemahaman atas independensi hakim harus diimbangi oleh pertanggungjawaban hakim (*judicial accountability*). Dengan kaitannya kemudian melahirkan konsep pertanggungjawaban peradilan termasuk integritas dan transparansi yang dibangun atas prinsip, harmonisasi antara tanggungjawab hukum (*legal responsibility*) dan tanggungjawab kemasyarakatan (*social responsibility*). Dalam kerangka yang demikian kemudian memunculkan pemikiran penggunaan konsep *code of conduct* berkenaan dengan konsep pengawasan terhadap hakim, yang keberadaannya terlihat sebagai tuntutan nasional dan internasional.¹³¹

¹³¹ A. Agus Bahaudin, **Ancaman Kriminalisasi Independensi Hakim**, Jurnal Varia Keadilan No. 327, Februari 2013, hlm. 67

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebenarnya sebenarnya tidak mengatur secara spesifik terkait dengan perdagangan ilegal satwa dilindungi yang dilindungi, dalam hal ini Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*). Akan tetapi perlu diingat bahwa Indonesia telah meratifikasi CITES yaitu melalui Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang CITES, dan sebagai konsekuensi logis dari sebuah ratifikasi adalah suatu negara yang telah meratifikasi suatu perjanjian internasional wajib untuk mentaati aturan yang ada di dalam konvensi tersebut. Terhadap kasus perdagangan maupun kepemilikan ilegal satwa liar dilindungi non-endemik di Indonesia, satwa yang dilindungi oleh suatu negara akan diperlakukan sama dengan satwa yang dilindungi di Indonesia. Dengan kata lain, jika terdapat satwa luar negeri yang masuk kategori dilindungi maka di Negara yang telah meratifikasi pun juga diperlakukan sebagai satwa yang dilindungi. Sehingga pemerintah Indonesia dalam hal ini wajib untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap ratifikasi CITES.

Apabila dilihat dalam konteks penegakan hukum, maka Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (criminal law application) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural

berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:¹³²

1. penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (normative system) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (administrative system) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparaturnya penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
3. penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (social system), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Dalam konteks penegakan hukum terhadap Perdagangan satwa luar non endemik Indonesia maka terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut diantaranya adalah Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Untuk mengetahui apakah tindakan perdagangan satwa yang dilindungi, dalam hal ini Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) apakah merupakan tindak pidana, maka perlu untuk dikaji terlebih dahulu

¹³² Dellyana, Shant. 1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hal 32

apa sajakah tindakan yang termasuk dalam kategori tindak pidana, dan bagaimanakah metode dalam menentukan apakah suatu tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ataukah tidak. Istilah tindak pidana itu sendiri merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut:

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”¹³³

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.¹³⁴

Menurut para pakar ahli pidana tindak pidana di definisikan sebagai berikut:

Strafbaarfeit dirumuskan oleh Pompe sebagaimana dikutip dari buku karya Lamintang, sebagai:

“Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak Sengaja telah dilakukan oleh

¹³³ Sudarsono, Kamus Hukum, Cetakan Kelima, Jakarta, P.T.Rineka Cipta, 2007, hlm 92

¹³⁴ Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012 Hlm 20

seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.”¹³⁵

Simons mengartikan sebagaimana dikutip dalam buku Leden Marpaung *strafbaarfeit* sebagai berikut.

“*strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”¹³⁶

S.R. Sianturi merumuskan tindak pidana sebagai berikut:

“Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).”¹³⁷

Secara umum dapat ditarik beberapa pokok yang utama dalam menentukan apakah suatu tindakan bisa dikategorikan sebagai suatu tindak pidana atau tidak berdasarkan apabila telah memenuhi beberapa poin berikut:¹³⁸

- a. diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. bertentangan dengan hukum;
- c. dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d. orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.

¹³⁵ P.A.F., Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat, Bandung, P.T.Citra Aditya Bakti, 2011, hlm 182.

¹³⁶ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ketujuh, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm 8.

¹³⁷ *Ibid*, hlm 25

¹³⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan keempat, Jakarta, P.T.Rienka Cipta, 2010, hlm 96

Sehingga berdasarkan Rumusan yang ada maka tindak pidana (*strafbaarfeit*) memuat beberapa syarat-syarat pokok sebagai berikut:¹³⁹

- a. Suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam pembahasan ini penulis akan menganalisis apakah tindakan perdagangan satwa liar dari luar Indonesia merupakan suatu tindakan pidana ataukah tidak berdasarkan pembahasan tentang tindak pidana. Sehingga tindakan tersebut dapat dinilai secara objektif.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana atas barang bukti satwa yang dilindungi di Indonesia

Untuk mengetahui apakah tindakan perdagangan satwa yang dilindungi, dalam hal ini Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) merupakan suatu dapat dikenakan sanksi pidana ataukah tidak menurut hukum Indonesia. Maka harus dimulai terlebih dahulu untuk menganalisis apakah perbuatan perdagangan satwa luar negeri di Indonesia suatu tindakan pidana. Sehingga nantinya bisa diketahui apabila telah dilakukan analisis terhadap hal tersebut. Adapun unsur-unsur dari tindak pidana itu sendiri adalah sebagai berikut.¹⁴⁰

1. Ada Perbuatan

¹³⁹ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Cetakan Kedua, Jakarta, P.T. Raja Grafindo, 2011, hlm 48

¹⁴⁰ P.A.F., Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Keempat, Bandung, P.T.Citra Aditya Bakti, 2011 hlm 435

Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, perbuatan manusia (*actus reus*) terdiri atas *commission* atau melakukan sesuatu dan *omission* atau tidak melakukan sesuatu. Tindakan perdagangan satwa liar merupakan suatu tindakan *commission* yang dapat diartikan sebagai melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh undang-undang atau sebagai pakar juga menyebutnya sebagai perbuatan (*aktif/positif*).

2. Sifat Melawan Hukum

Penyebutan “sifat melawan hukum” dalam pasal-pasal tertentu menimbulkan tiga pendapat tentang arti dari “melawan hukum” ini yaitu diartikan:

- a. bertentangan dengan hukum (*objektif*);
- b. bertentangan dengan hak (*subjektif*) orang lain;
- c. Tanpa hak.¹⁴¹

Lamintang menjelaskan sifat melawan hukum sebagai berikut:

“menurut ajaran *Wederrechtelijk* dalam arti *formil*, suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat *Wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur delik yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *Wederrechtelijk* dalam arti *materiil*, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *Wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan harus ditinjau dari ketentuan hukum yang tertulis melainkan harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.”¹⁴²

Melihat uraian definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam yakni:¹⁴³

¹⁴¹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Indonesia*, Cetakan Ketiga, Bandung, Refka Aditama, 2010, hlm 20.

¹⁴² P.A.F.Lamintang, *Op.Cit*, hlm 445

¹⁴³ Amir Ilyas, *Op.Cit*. hlm 53

1. Sifat melawan hukum formil (formale wederrechtelijk).

Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali diadakan pengecualian pengecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang, bagi pendapat ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.¹⁴⁴

2. Sifat melawan hukum materill (materiel wedderrchtelijk).

Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan yang berlaku di masyarakat.¹⁴⁵

Untuk menjatuhkan pidana, harus dipenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam suatu pasal. Salah satu unsur dalam suatu pasal adalah sifat melawan hukum (wederrechtelijk) baik secara eksplisit maupun implisit ada dalam suatu pasal. Meskipun adanya sifat melawan hukum yang eksplisit maupun implisit dalam suatu pasal masih dalam perdebatan, tetapi tidak dapat disangsikan lagi bahwa unsur ini merupakan unsur yang ada atau mutlak dalam suatu tindak pidana agar si pelaku atau si terdakwa dapat dilakukan penuntutan dan pembuktian didepan pengadilan.¹⁴⁶

Adanya sifat melawan hukum yang dicantumkan dalam ketentuan perundang-undangan, hal ini disebabkan karena perbuatan yang tercantum sudah sedemikian wajar sifat melawan hukumnya, sehingga tidak perlu dicantumkan

¹⁴⁴ *ibid*

¹⁴⁵ *Ibid.*

¹⁴⁶ Teguh Prasetyo, Op.cit. hlm 69

secara eksplisit, misalnya pada Pasal 338 KUHP tidak mengandung kata melawan hukum, namun setiap orang normal memandang bahwa menghilangkan nyawa orang lain adalah melawan hukum, bertentangan tidak saja dengan hukum, tetapi semua kaidah-kaidah sosial dan agama.¹⁴⁷

Dalam ketentuan pasal tentang perdagangan satwa liar menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pasal 20 ayat 2

“Barang Siapa Dengan Sengaja menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati (Pasal 21 ayat (2) huruf (b), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Dalam pasal tersebut diatas tidak terdapat kata melawan hukum, akan tetapi rumusan pasal tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Hal ini sama halnya dengan beberapa pasal dalam KUHP yang juga tidak mencantumkan klausul “melawan hukum” walaupun pasal tersebut dimaksudkan untuk pasal perbuatan melawan hukum. Tidak semua perumusan tindak pidana dalam KUHP memuat rumusan melawan hukum. hal ini dapat dilihat antara lain, dalam pasal-pasal berikut ini:¹⁴⁸

- a. Pasal 167 KUHP, yang berbunyi antara lain sebagai berikut: “barangsiapa dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa kedalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan yang dipakai oleh orang lain, atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang

¹⁴⁷ Zainal Abidin Farid, Op.Cit, hlm 240

¹⁴⁸ R Soesilo, Op.Cit, hlm 143

- yang berhak, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500.”
- b. Pasal 333, yang berbunyi antara lain sebagai berikut: “(1) barangsiapa dengan sengaja menahan (merampas kemerdekaan) orang atau dengan meneruskan tahanan itu dengan melawan hak dihukum penjara selama-lamanya delapan tahun.”
- c. Pasal 406, yang berbunyi antara lain sebagai berikut: “(1) barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi dipakai atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500.”

Oleh karena itu tindak perdagangan satwa juga dapat dikatakan sebagai tindak yang melawan hukum. Karena melihat dari unsur yang terdapat dalam pasal tentang perdagangan satwa yang merujuk pada tindakan melawan hukum.

Untuk menentukan apakah sanksi pidana dari tindakan perdagangan satwa liar dari luar Indonesia, ada baiknya untuk menelaah terlebih dahulu terkait apa yang dimaksud dengan sanksi pidana itu sendiri. Hal ini dibutuhkan agar dalam menganalisis terdapat acuan dan batasan yang tepat untuk menilai. Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu

jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu¹⁴⁹, sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.¹⁵⁰

Pemberian sanksi pidana tentu memiliki suatu tujuan, untuk apa pidana itu diberikan dan apa yang diinginkan setelah itu. Tujuan pembedaan sendiri adalah untuk mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang, tujuan diadakannya pembedaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar hukum dari pidana. bahwa Dalam konteks dikatakan Hugo De Groot “malim pasisionis propter malum actionis” yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat. Berdasarkan pendapat tersebut, tampak adanya pertentangan mengenai tujuan pembedaan, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana pembalasan atau teori absolute dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif atau teori tujuan, serta pandangan yang menggabungkan dua tujuan pembedaan tersebut. Muladi

¹⁴⁹ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, BandarLampung, Unila, 2009, hlm.8

¹⁵⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 81

mengistilahkan teori tujuan sebagai teleological theories dan teori gabungan disebut sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan dari pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diberikan pelaku tindak pidana.¹⁵¹

Untuk mengetahui dan menganalisis apakah sanksi pidana bagi pelaku perdagangan satwa yang dilindungi di Indonesia, maka harus ditinjau terlebih dahulu dari peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut. Hal ini penting dilakukan karena melalui norma yang mengaturnya lah bisa diketahui apakah suatu tindakan bisa dikenakan sanksi ataukah tidak, dan tindakan seperti apa yang seharusnya diberikan sanksi.

Secara norma terdapat beberapa peraturan perundang-undangan dan konvensi internasional yang telah diratifikasi yang mengatur mengenai keberadaan satwa di Indonesia. Akan tetapi peraturan atau norma yang ada belum mengatur secara spesifik sanksi dari tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi, dalam hal ini Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), akan tetapi sanksi pidana hanya dikenakan terhadap

¹⁵¹ *Ibid*

perdagangan satwa liar asli Indonesia. Adapun norma – norma tersebut diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Dalam Undang-undang perdagangan satwa liar diatur dalam pasal 40 ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. Undang-undang ini hanya mengatur perdagangan satwa dari dalam negeri dan tidak menyebut secara spesifik tentang perdagangan satwa yang dilindungi, dalam hal ini Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*).

2. CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) yang telah diratifikasi dengan Keputusan Pemerintah No. 43 Tahun 1978 Mengatur tentang daftar satwa liar yang dilindungi dari seluruh dunia.

Ketentuan pidana mengenai perlindungan satwa terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya yaitu terdapat pada pasal 40 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5, dalam ketentuan pidana yang terdapat dalam UU Nomor 5 tahun 1990 ini pada ayat 5 nya membagi tindak pidana ke dalam 2 golongan yaitu tindak pidana dikatakan sebagai kejahatan untuk ayat 1 dan 2 dan tindak pidana dikatakan sebagai pelanggaran untuk ayat 3 dan 4

pada kesempatan ini saya akan lebih memfokuskan pembahasan pada ayat 2 yakni tindak pidana yang dikatakan sebagai kejahatan yang dikhususkan lagi terhadap ancaman pidana yang berkaitan dengan perdagangan satwa liar yaitu pasal 40 ayat 2 yang unsur-unsur deliknya merupakan akibat hukum atas perbuatan pidana yang terdapat pada pasal 21 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Dalam UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE pasal 40 ayat 2 menyatakan: “Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Berikut uraian mengenai perbuatan mana saja yang dikategorikan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara dalam pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang unsur-unsur deliknya merupakan akibat hukum atas perbuatan pidana yang terdapat dalam pasal 21 ayat 2:

1. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup,
2. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati,
3. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia,
4. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari

- bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia,
5. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan mengambil atau sarang satwa yang dilindungi.

Dari uraian ini maka setiap orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut diatas akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dari pola ancaman pidana yang diterapkan dalam pasal 40 ayat 2 ini sesuai dengan sistem yang dianut dalam KUHP yaitu sistem maksimal dalam merumuskan ancaman pidana, karena sudah dirancang oleh pembuat undang-undang bahwa ancaman pidana penjara untuk kejahatan-kejahatan diatas maksimal 5 tahun penjara maka tidaklah mungkin kita akan mendapatkan orang-orang yang melakukan kejahatan yang dimaksud, diancam pidana penjara diatas lima tahun.

Pengaturan sanksi bagi perbuatan memperjualbelikan satwa langka nampak jelas dan mengikat, diantaranya sebagai contoh, yang dengan sengaja memperjualbelikan satwa liar yang dilindungi sesuai dengan Pasal 21 Ayat (2) huruf d Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 4 Jo Pasal 4 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sesuai dengan daftar lampiran Nomor urut 224, yang diperjelas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999.

Secara lengkap, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1990 ini berbunyi:¹⁵²

- 1) *“Barangsiapa dengan Sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; (Pasal 21 ayat (2) huruf a), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (2));*
- 2) *Barang Siapa Dengan Sengaja menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati (Pasal 21 ayat (2) huruf (b), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (2));*
- 3) *Dengan Sengaja memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; (Pasal 21 ayat (2) huruf d), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (2));”*

Permasalahan yang terjadi adalah Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya hanya mengatur tentang perdagangan satwa liar Indonesia. Ketentuan mengenai perdagangan satwa liar dari luar Indonesia tidak dinyatakan secara eksplisit di Undang-Undang tersebut. Akan tetapi yang harus diingat adalah bahwa Indonesia telah meratifikasi CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) yang telah diratifikasi dengan Keputusan Pemerintah No. 43 Tahun 1978.

Secara internasional CITES mewajibkan negara anggota untuk dapat memberikan sanksi hukum yang berkaitan dengan jenis-jenis yang termasuk dalam appendiks CITES, selain itu tidak ada sanksi hukum

¹⁵² Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

terhadap pelanggaran CITES bagi jenis-jenis yang berasal dari luar Indonesia. Akibat dari hal tersebut di atas, satwa liar dilindungi non-endemik di Indonesia dapat dimiliki oleh orang tanpa dapat dikenakan sanksi hukum. Sedangkan CITES mewajibkan “para Pihak”, termasuk Indonesia sebagai anggota, untuk membuat regulasi yang mengatur perdagangan satwa liar baik ekspor maupun impor guna mencegah satwa liar tersebut dari bahaya kepunahan.

Sehingga untuk menganalisis apakah sanksi hukum pidana terhadap perdagangan satwa liar Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya harus kemudian di korelasikan dengan CITES yang telah di ratifikasi oleh Indonesia. Dimana dalam CITES terdapat seluruh daftar satwa liar di dunia yang dilindungi. Konvensi ini bertujuan untuk melindungi tumbuhan dan satwa liar terhadap perdagangan internasional spesimen tumbuhan dan satwa liar yang mengakibatkan kelestarian spesies tersebut terancam. Jika diuraikan, maka didapat ada 4 hal pokok yang menjadi dasar terbentuknya konvensi CITES, yaitu :¹⁵³

- a. Perlunya perlindungan jangka panjang terhadap tumbuhan dan satwa liar bagi manusia;
- b. Meningkatnya nilai sumber tumbuhan dan satwa liar bagi manusia;
- c. Peran dari masyarakat dan negara dalam usaha perlindungan tumbuhan dan satwa liar sangat tinggi;

¹⁵³ Konservasi Sumber Daya Alam Bali, “*Cites Konvensi Internasional Perdagangan TSL*” URL: <http://www.ksda-bali.go.id>. Diakses pada tanggal 27 November 2016

- d. Makin mendesaknya kebutuhan suatu kerjasama internasional untuk melindungi jenis-jenis tersebut dari over eksploitasi melalui control perdagangan internasional.

B. Analisa Pemusnahan Barang Bukti Harimau Sumatera terhadap prinsip kemanfaatan hukum

Perdagangan satwa yang dilindungi, dalam hal ini Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) harus dilihat dari unsur pasal 21 ayat 2 point d dari Undang – Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Karena di Indonesia pasal yang mengatur tentang pemidanaan terhadap perdagangan satwa liar hanya ada dalam UU tersebut. Sehingga untuk itu pelaksanaan pasal ini tentu tidak bisa berdiri sendiri karena isi dari pasal tersebut belum lengkap megatur satwa yang dilindungi yang dilindungi, dalam hal ini Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*). Untuk itu maka harus dikaitkan dengan Ratifikasi CITES. Dimana dalam CITES Apendiks I telah diatur tentang daftar satwa yang dilindungi dari seluruh dunia. Penggunaan CITES sebagai norma dalam melindungi satwa luar yang diperjual belikan di dalam negeri bertujuan untuk menghentikan segala bentuk perdagangan terhadap satwa liar. Adapun unsur dari Pasal 21 ayat 2 point d dari Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah sebagai berikut:

“ Setiap orang dilarang untuk: memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian

tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia”

Dengan melihat rumusan pasal diatas kita dapat melihat tindak pidana yang terdapat di dalamnya, sebagai berikut:

1. Setiap Orang dilarang untuk

Yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini bukan hanya terdapat orang perseorangan (naturlijk persoon) tetapi juga korporasi, baik badan hukum (recht person) ataupun bukan badan hukum untuk mendapat gambaran tentang addressat suatu tindak pidana dapat juga dilakukan dengan melihat hal ihwal kepentingan yang hendak dilindungi oleh norma-norma hukum pidana itu. Sedangkan yang dimaksud dilarang disini adalah tidak diperbolehkan melakukan sesuatu atau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata dilarang berasal dari kata “larang” yang artinya memerintahkan supaya tidak melakukan sesuatu; tidak memperbolehkan berbuat sesuatu.

2. Memporniagakan, menyimpan atau memiliki atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia

Dalam hal ini memorniagakan, menyimpan dan memiliki. Yang dimaksudkan dengan memorniagakan adalah menjadikan melakukan proses jual beli atau mendapatkan keuntungan dari tindakan tersebut. Yang dimaksud dengan menyimpan adalah menyimpang barang yang dilarang tersebut dan memiliki adalah menjadikan hak milik pribadi. Sedangkan memindahkan tempat dari suatu tempat ke tempat yang lain baik itu masih dalam yurisdiksi negara Indonesia ataupun keluar Indonesia. Dari unsur ini tidak disebutkan mengenai perpindahan yang dilindungi, dalam hal ini

Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) ke Indonesia, hanya mengatur tentang perpindahan dari dalam negeri ke Indonesia. Untuk itu dalam pasal ini tidak bisa berdiri sendiri, maka keterkaitan peraturan lain yang mendukung terselenggaranya perlindungan hukum terhadap satwa liar lain harus menjadi penopang dari pasal ini.

Perdagangan satwa liar menurut Pasal 21 ayat 2 point d dari Undang – Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tidak bisa hanya diartikan berlaku bagi satwa liar Indonesia saja,. Hal ini dikarenakan Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut. Dalam konvensi tersebut mewajibkan bagi seluruh negara yang telah meratifikasi untuk mematuhi ketentuan yang ada didalamnya. Didalam CITES apendiks 1 mengatur tentang seluruh satwa yang dilindungi di seluruh dunia. Maka wajib bagi Indonesia untuk memberikan sanksi bagi setiap orang yang memperjual belikan satwa *yang dilindungi, dalam hal ini Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae)* yang dilindungi berdasarkan CITES. Adapaun sanksi pidana yang diterapkan adalah sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pasal 40 ayat 2 Juncto Keputusan Pemerintah No. 43 Tahun 1978 menyatakan: “Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

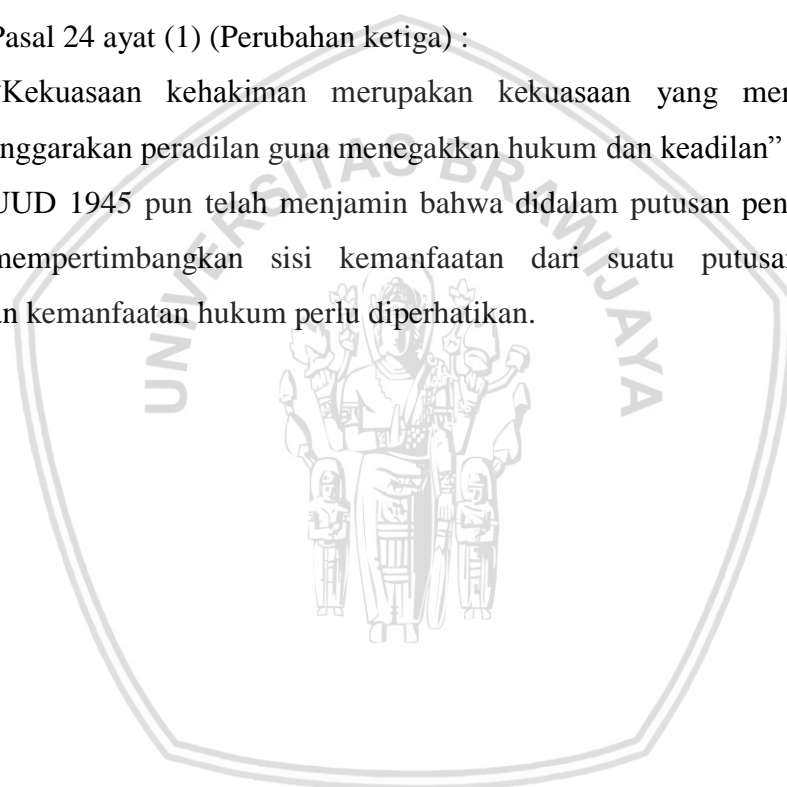
Indonesia adalah negara hukum dalam perkembangannya tercantum dalam penjelasan UUDNRI Tahun1945 (sebelum perubahan), yaitu

negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Machtsstaat) dan perubahan ketiga UUDNRI Tahun 1945 pada Sidang Tahunan MPR tahun 2001 yang menetapkan prinsip negara hukum diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 (perubahan ketiga) yaitu Negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum sebagai instrument pemerintahan tidak saja harus pasti (kepastian hukum) dan dibuat secara demokratis, tapi juga harus menjamin keadilan dan kemanfaatan bagi kesejahteraan rakyat, hal ini sesuai dengan konsepsi negara hukum yang dianut Indonesia yang dituangkan dalam pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 adalah:

Pasal 24 ayat (1) (Perubahan ketiga) :

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”

UUD 1945 pun telah menjamin bahwa didalam putusan pengadilan juga harus mempertimbangkan sisi kemanfaatan dari suatu putusan, sehingga kemudian kemanfaatan hukum perlu diperhatikan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Kebijakan pemberantasan *wildlife crime* di Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya beserta aturan-aturan pelaksanaannya belum terimplementasi dengan baik dalam mendukung kelestarian lingkungan hidup. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya eksploitasi sumber daya alam hayati melalui perburuan dan perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar. *Wildlife crime* di Indonesia dilatarbelakangi oleh tingginya nilai ekonomi dari perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Perdagangan ilegal tersebut memicu eksploitasi satwa yang dilindungi, dalam hal ini harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) yang dapat berakibat pada kepunahan jenis, menurunnya keanekaragaman hayati dan daya dukung lingkungan. Dengan demikian penegakan hukum atas penanganan barang bukti tersebut memiliki dampak yang berpengaruh terhadap nilai kemanfaatan, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 24 ayat (1) dan (2), yang dinyatakan bahwa, terhadap satwa yang dilindungi, negara memiliki

kewenangan untuk merampas barang bukti tersebut, termasuk bagian-bagiannya selanjutnya negara berwenang untuk mengembalikan ke habitat aslinya atau menyerahkan satwa yang dilindungi tersebut, termasuk harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), kepada lembaga konservasi. Hal ini berlaku pula atas bagian-bagiannya untuk dimanfaatkan terlebih dahulu melalui penelitian yang dilakukan oleh lembaga konservasi, dalam hal ini Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) sebelum dimusnahkan.

2. Hakim, sebagai salah satu penegak hukum, dituntut untuk lebih memiliki kebebasan dalam memutus suatu perkara dengan menimbang nilai kemanfaatan yang dimiliki atas suatu barang bukti, terlebih untuk satwa yang dilindungi, dalam penelitian ini harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) termasuk pula bagian-bagiannya. Selain mencerminkan pertimbangan hukum atas suatu putusan yang berlandaskan asas legalitas dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan mencerminkan nilai kemanfaatan atas barang bukti tersebut. Kemudian adanya putusan pengadilan yang mencerminkan atas penanganan barang bukti tercermin dalam Pasal 45 KUHP. Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dan apabila perkara sudah ada di tangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual yang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan

disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya, serta Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, dapat dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.

B. Saran

1. Perlu peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya nilai/manfaat sumber daya alam hayati bagi lingkungan hidup dan keberlanjutan pemanfaatannya, sehingga manfaat sumber daya alam hayati tidak hanya dinilai dari keuntungan ekonomi jangka pendek. Selain itu, perlu dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat terutama masyarakat sekitar hutan untuk mengurangi ketergantungannya pada sumber daya alam sehingga kelestarian lingkungan dapat terjaga.
2. Pembangunan kapasitas hakim terhadap pentingnya satwa yang dilindungi, termasuk harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) sebagai hewan endemik Indonesia, dengan memberikan perlindungan hukum beriringan dengan penegakkannya yang tegas tercermin dalam pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim dalam memutus suatu perkara satwa yang dilindungi termasuk penanganan bagian-bagiannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Effendi, A. Mansyur, 1994, **Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia**, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hamzah, Andi, 2008, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya, 1988, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I**, Jakarta: Pustaka Kartini.
- Ibrahim, Johnny, 2012, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Malang: Bayumedia.
- Lili rasjidi dan I.B wyasa putra, 1993, **Hukum sebagai suatu sistem**, remaja rosdakarya, Bandung.
- Manan, Bagir, 1995, **Perumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara**, Bandung: Mandar Maju.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2014, **Penelitian Hukum Edisi Revisi**, Jakarta: Kencana.
- MD, Moh. Mahfud, 2012, **Politik Hukum Di Indonesia**, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mertokusumo, Sudikno, 2009, **Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar**, Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Nurjaya, I Nyoman, 2013, **Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum**, Malang: UM-Press.
- Rahayu, Derita Prapti, 2014, **Budaya Hukum Pancasila**, Yogyakarta: Thafa Media.
- Siahaan, Monang, 2017, **Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana**, Jakarta: PT Grasindo.
- Soekanto, Soerjono, 2014, **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta: UI-Press.
- _____ dan dan Sri Mamudji, 2006, **Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat**, Jakarta: Rajawali Press.

- Syamsudin, M., 2007, **Operasionalisasi Penelitian Hukum**, Jakarta: RajaGrafindo.
- Yurizal, 2017, **Reformulasi Kewenangan Polri dan PPNS dalam Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup**, Malang: Media Nusa Creative.
- Wahyono, Padmo, 2009, **Kerangka Landasan Pembangunan Hukum**, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Wildlife Conservation Society Indonesia Program, 2015, **Proyek Perubahan Untuk Keadilan (Changes For Justice) Kejahatan Terhadap Satwa Liar Di Indonesia: Penilaian Cepat Terhadap Pengetahuan, Tren, Dan Prioritas Aksi Saat Ini(online)**, USAID, http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00KH51.pdf

MAJALAH, JURNAL, MAKALAH, ARTIKEL ILMIAH LAINNYA

- Abdul Muktie Fadjar, Peran The Rule of Law dalam Penguatan Civil Society, dalam IDEA kumpulan Makalah “Konstitusi dan Demokrasi, IDEA, Jakarta 2001
- Koesnadi Hardjasoemantri, **Pokok-Pokok Pemikiran Hukum Lingkungan dan Implementasinya terhadap Keseimnamgam Ekosistem Indonesia**, dalam Kumpulan Tulisan Hukum dan Bencana Alam di Indonesia, kerjasama JICA-Kedubes Jepang di Jakarta, 2002
- Laporan Utama: Peran Bea Cukai dalam Mendukung CITIES, Jaga Alam, lindungi Flora dan Fauna Indonesia, Volume 47, Nomor 7, Juli 2015
- Rachmat Witoelar, **Pengelolaan Lingkungan Nasional dan Rencana Tindak Lanjut Pembangunan Berkelanjutan**, Makalah disampaikan Seminar Nasional Pengelolaan Lingkungan dalam Rangka Implementasi Agenda-21, yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 16 Juli 2005
- Soedarmadji, **Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pencemaran Air yang Disebabkan oleh Limbah Cair dari Industri**, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya, 2009

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, (Lembaran Negara Nomor 49 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Nomor 167 Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3803).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3804).

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Nomor 147 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4453).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Nomor 137 Tahun 2009 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5056).

Peraturan Menteri Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.26/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2017 tentang Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Nomor 642).

SURAT KABAR DAN WEBSITE

Jawa Pos, Musnahkan Hasil Tangkapan, terbitan Kamis, 8 Januari 2018

Mahkamah Agung (*Online*), <https://putusan.mahkamahagung.go.id/main/>

ProFauna, Tahun 2015 Ada 5000 kasus Perdagangan Satwa liar dan 370 Kasus

Perburuan Satwa Liar (*Online*), <https://www.profauna.net/id/content/tahun-2015-ada-5000-kasus-perdagangan-satwa-liar-dan-370-kasus-perburuan-satwa-liar#.WpP9VfegfIU>

The Trade Data Dashboards (*Online*), <https://www.cites.org/eng/disc/what.php>

World Wide Foundation, Pemusnahan Barang Bukti Satwa Liar Dilindungi (*Online*), <https://www.wwf.or.id/?52043/Pemusnahan-Barang-Bukti-Satwa-Liar-Dilindungi>

